

Nomor : B-321/SETKPI.31/KU.02.12/05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan dan
Laporan Barang Milik Negara (BMN)
Komisi Penyiaran Indonesia
Tahun Anggaran 2025 *Audited*

Jakarta, 4 Mei 2026

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I
Jalan Wahidin II No. 3, Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10710

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital RI Nomor 647/SJ.3/KU.01.09/04/2026 tanggal 6 April 2026 hal Permintaan Usulan Jurnal Koreksi atas Koreksi Data/Transaksi Tahun 2025 dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited* dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 *Audited* serta data-data pendukung lainnya, antara lain:

- 1) Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR);
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Realisasi Anggaran;
- 5) Neraca;
- 6) Neraca Percobaan Akrua;
- 7) Neraca Percobaan Kas;
- 8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Akun;
- 9) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan menurut Akun;
- 10) Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
- 11) Neraca Percobaan Akrua (Saldo Awal);
- 12) Catatan atas Laporan Keuangan;
- 13) Telaah atas Laporan Keuangan UAKPA;
- 14) Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Umri

Tembusan Yth.:

1. Biro Keuangan dan BMN Kementerian Komunikasi dan Digital RI
2. Biro Umum Kementerian Komunikasi dan Digital RI



LAPORAN KEUANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2025 *AUDITED*

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Penyiaran Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja Komisi Penyiaran Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026

Kepala Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Umri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	13
A.1 Profil & Kebijakan Teknis Komisi Penyiaran Indonesia	13
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	15
A.5 Capaian Kinerja Strategis dan Catatan Penting Lainnya	15
A. Pengungkapan Program Prioritas Nasional	17
B. Pengungkapan Capaian Output Strategis	47
C. Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN	49
A.6 Kebijakan Akuntansi	49
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	58
B.1 Pendapatan	59
B.2 Belanja	61
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	71
C.1 Aset Lancar	71
C.2 Aset Tetap	76
C.3 Aset Lainnya	79
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	82
C.5 Ekuitas	85

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	85
D.1 Pendapatan	85
D.2 Beban Pegawai	85
D.3 Beban Persediaan	87
D.4 Beban Barang dan Jasa	88
D.5 Beban Pemeliharaan	89
D.6 Beban Perjalanan Dinas	90
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	90
D.8 Beban Bunga	91
D.9 Beban Subsidi	91
D.10 Beban Hibah	91
D.11 Beban Bantuan Sosial	91
D.12 Beban Penyusutan & Amortisasi	91
D.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92
D.14 Beban Transfer	92
D.15 Beban Lain-lain	92
D.16 Kegiatan Non Operasional	92
D.17 Pos Luar Biasa	93
D.18 Surplus/ Defisit – LO	94
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	94
E.1 Ekuitas Awal	94
E.2 Surplus/ Defisit – LO	94
E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	94
E.4 Transaksi Antar Entitas	95
E.5 Ekuitas Akhir	96
F. Pengungkapan Penting Lainnya	96
F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	96
F.2 Rekening Pemerintah	97
VI. Lampiran Data Laporan Keuangan dan BMN dari Aplikasi SAKTI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	6
Tabel 2	: Perbandingan Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	7
Tabel 3	: Penggolongan Kualitas Piutang	52
Tabel 4	: Masa Manfaat Aset Tetap	54
Tabel 5	: Masa Manfaat Aset Lainnya	56
Tabel 6	: Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025	58
Tabel 7	: Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025	60
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	60
Tabel 9	: Rincian Realisasi Belanja Neto Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025	61
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	62
Tabel 11	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	63
Tabel 12	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	65
Tabel 13	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	67
Tabel 14	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	68
Tabel 15	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel 16	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	69
Tabel 17	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	70
Tabel 18	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	70
Tabel 19	: Perbandingan Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	71
Tabel 20	: Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	72
Tabel 21	: Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	73
Tabel 22	: Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	73
Tabel 23	: Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	74
Tabel 24	: Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	75
Tabel 25	: Perbandingan Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	76
Tabel 26	: Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	76
Tabel 27	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025	78
Tabel 28	: Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	79
Tabel 29	: Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025	80
Tabel 30	: Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025	80
Tabel 31	: Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025	81
Tabel 32	: Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	82
Tabel 33	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	83

Tabel 34	: Rincian Utang yang Belum Diterima Tagihannya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	83
Tabel 35	: Rincian Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	84
Tabel 36	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)	84
Tabel 37	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	86
Tabel 38	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	88
Tabel 39	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	88
Tabel 40	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	89
Tabel 41	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	90
Tabel 42	: Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	90
Tabel 43	: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	92
Tabel 44	: Perbandingan Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)	93
Tabel 45	: Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025	96
Tabel 46	: Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025	97

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Penyiaran Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Umri

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp48.956.554,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.737.454.132,00 atau mencapai 79,25 persen dari alokasi anggaran sebagaimana revisi DIPA terakhir sebesar Rp52.662.290,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Negara dan Hibah	0	48.956.554	0	0	53.915.083	0
Belanja Negara	52.662.290.000	41.737.454.132	79,25	60.686.122.000	56.788.695.392	93,58

2. NERACA

Neraca pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Nilai aset neto per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.513.975.322,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp278.894.152,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.214.289.899,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp20.791.271,00;

Nilai kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.612.180,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp1.510.363.142.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *unAudited* dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 2
Perbandingan Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)	(Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	278.894.152	335.045.804	-56.151.652	-16,76
Aset Tetap	1.214.289.899	1.950.730.871	-736.440.972	-37,75
Aset Lainnya	20.791.271	87.307.189	-66.515.918	-76,19
Jumlah Aset	1.513.975.322	2.373.083.864	-859.108.542	-36,20
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	3.612.180	0	3.612.180	0
Jumlah Kewajiban	3.612.180	0	3.612.180	0
EKUITAS				
EKUITAS	1.510.363.142	2.373.083.864	-862.720.722	-36,35
Jumlah Ekuitas	1.510.363.142	2.373.083.864	-862.720.722	-36,35
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.513.975.322	2.373.083.864	-859.108.542	-36,20

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.598.968.300,00 sehingga Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp42.598.968.300,00).

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp47.750.000,00 dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa sebesar (Rp42.551.218.300,00) sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp42.551.218.300,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.373.083.864,00 ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar (Rp42.551.218.300,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp41.688.497.578,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.510.363.142,00. Adapun Transaksi Antar Entitas sebesar Rp41.688.497.578,00 merupakan transaksi pengelolaan dan pertanggungjawaban kas antara satuan kerja dengan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPPN).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Anggaran REALISASI NETTO	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI NETTO		REALISASI NETTO
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	Rp 48.956.554	0	53.915.083
JUMLAH PENDAPATAN		0	Rp 48.956.554	0	53.915.083
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	17,604,749,000	Rp 16,621,075,000	94,41	7.352.537.740
Belanja Barang	B.2.2	34,937,541,000	Rp 25.000.495.132	71,56	48.520.406.252
Belanja Modal	B.2.3	120,000,000	Rp 115.884.000	96,57	915.751.400
JUMLAH BELANJA		52.662.290.000	Rp 41.737.454.132	79,25	56.788.695.392

NERACA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.3	0	1.206.554
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	25.448.482	0
Persediaan	C.1.4	253.445.670	333.839.250
Jumlah Aset Lancar		278.894.152	335.045.804

ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	20.802.728.712	20.966.728.712
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	140.926.055	140.926.055
Akumulasi Penyusutan	C.2.3	-19.729.364.868	-19.156.923.896
Jumlah Aset Tetap		1.214.289.899	1.950.730.871
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1,895,480,280	1.779.596.280
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	-2.038.689.009	-1.692.289.091
Aset Lain-Lain	C.3.3	164.000.000	
Jumlah Aset Lainnya		20.791.271	87.307.189
JUMLAH ASET		1.513.975.322	2.373.083.864
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3.612.180	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2		0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3		0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.4		0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.612.180	0
JUMLAH KEWAJIBAN		3.612.180	0
EKUITAS			
EKUITAS	C.5		
Ekuitas		1.510.363.142	2.373.083.864
Jumlah Ekuitas		1.510.363.142	2.373.083.864
JUMLAH EKUITAS		1.510.363.142	2.373.083.864
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.513.975.322	2.373.083.864

LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PENYIARAN INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0
PENDAPATAN		0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16.595.626.518	7.351.331.186

Beban Persediaan	D.3	365.912.297	863.957.619
Beban Barang dan Jasa	D.4	21.667.593.068	29.946.264.047
Beban Pemeliharaan	D.5	865.588.511	1.753.925.730
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.185.407.016	15.901.040.525
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bunga	D.8	0	0
Beban Subsidi	D.9	0	0
Beban Hibah	D.10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.11	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.12	918.840.890	1.478.210.648
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.13	0	0
Beban Transfer	D.14	0	0
Beban Lain-Lain	D.15	0	0
JUMLAH BEBAN		42.598.968.300	57.294.729.755
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-42.598.968.300	-57.294.729.755
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.16	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		47.750.000	42.229.238
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		47.750.000	52.125.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	9.895.762
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		47.750.000	42.229.238
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-42.551.218.300	-57.252.500.517
POS LUAR BIASA	D.17	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.18	-42.551.218.300	-57.252.500.517

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (AUDITED)

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.373.083.864	2.890.804.072
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	42.551.218.300	-57.252.500.517
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	41.688.497.578	56.734.780.309
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-862.720.722	-517.720.208
EKUITAS AKHIR	E.5	1.510.363.142	2.373.083.864

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Penyiaran

Indonesia

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

KPI dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai Lembaga Negara yang bersifat Independen mengatur hal-hal mengenai Penyiaran. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme bidang penyiaran.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sekaligus menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Penyiaran Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Capaian Kinerja Strategis dan Catatan Penting Lainnya

Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2025-2029, disampaikan bahwa terdapat 17 arah Pembangunan. Komisi Penyiaran Indonesia akan lebih menfokuskan perannya dalam melakukan pembangunan landasan transformasi bagi bidang supremasi hukum, stabilitas, Kepemimpinan Indonesia terutama dalam arah pembangunan hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial. Arah kebijakan

dan strategi Komisi Penyiaran Indonesia lebih terkait pada agenda Pembangunan yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari agenda pembangunan tersebut adalah Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai target agenda pembangunan nasional yang telah menjadi fokus kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh KPI dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, yaitu:

- 1) Penguatan Ekosistem Industri Penyiaran
 - a. Melakukan reformasi tata kelola industri penyiaran;
 - b. Menyusun regulasi terkait penyiaran FTA berbasis satelit;
 - c. Penyusunan regulasi radio digital.
- 2) Peningkatan Dukungan kepada Lembaga Penyiaran untuk Bertransformasi di era digital:
 - a. Mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas lembaga penyiaran lokal;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM pelaku industri penyiaran;
- 3) Peningkatan Penyiaran yang Berakhlak:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Penyiaran;
 - b. Penguatan asosiasi media Penyiaran dalam mendorong penerapan teknologi informasi yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan jumlah Lembaga Penyiaran yang tersertifikasi;
- 4) Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang berkualitas, Sehat, dan bermartabat:
 - a. Meningkatkan kualitas Isi Siaran televisi dan radio;
 - b. Meningkatkan kapasitas industri penyiaran;
 - c. Pengawasan dan evaluasi siaran televisi dan radio; dan

5) Terwujudnya tata kelola Lembaga Penyiaran yang adaptif dan berkualitas tinggi melalui adopsi dan implementasi teknologi baru (AI, Big Data dll):

- a. Peningkatan sistem tata kelola Lembaga penyiaran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan di bidang isi Siaran;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan isi siaran melalui pemanfaatan AI dan Big Data untuk memantau dan menganalisis isi siaran; dan
- c. Mengembangkan Inovasi Konten Siaran dengan pemanfaatan Teknologi Baru AI untuk meningkatkan efisiensi operasional.

A. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional yang terdapat pada satuan kerja Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	PCRO (%)
1	QAHT01	Layanan Pengawasan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio	260.236.000	236.954.530	88,75	1	1,00	Layanan	100,00
2	PBMO01	Rekomendasi Hasil Peningkatan Indeks Penyiaran Indonesia	2.750.719.000	2.455.408.070	89,07	1	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00
3	QIC501	Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi	8.818.210.000	8.077.415.130	91,69	61	61,00	Lembaga	100,00
4	PBMO02	Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran	925.993.000	827.551.117	89,37	1	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00

Adapun rincian realisasi program Prioritas Nasional (PN) tersebut sebagai berikut:

1. Rekomendasi Hasil Peningkatan Indeks Penyiaran Indonesia dengan pagu anggaran sebesar Rp2.756.719.000,00 dan Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran dengan pagu anggaran sebesar Rp 925.993.000,00.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara independen dan memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

KPI memegang peranan strategis dalam menjaga serta mendorong peningkatan mutu siaran televisi. Salah satu tugas utamanya ialah memastikan bahwa program televisi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung unsur pendidikan serta menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat. Selain itu, KPI bertanggung jawab mencegah penayangan konten yang berpotensi merugikan atau menyesatkan publik. Tugas tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang pada Pasal 4 menegaskan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta sarana kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, program siaran televisi idealnya mampu memenuhi seluruh fungsi tersebut secara seimbang.

Realisasi program siaran yang berkualitas sesuai dengan amanat undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Salah satu kendala utama adalah tingginya ketergantungan industri penyiaran terhadap data Nielsen sebagai alat ukur jumlah penonton atau rating. Rating memiliki pengaruh besar dalam ekosistem pertelevisian karena menjadi dasar pertimbangan biro iklan dalam menempatkan produk. Program dengan tingkat rating tinggi umumnya lebih mudah memperoleh iklan, sementara tayangan yang berkualitas tetapi memiliki rating rendah cenderung kesulitan mendapatkan dukungan iklan. Kondisi ini mendorong stasiun televisi lebih mengutamakan program yang berpotensi meningkatkan rating dibandingkan memperhatikan kualitas konten dan nilai edukatifnya. Akibatnya, orientasi penyiaran lebih condong pada kepentingan bisnis daripada kepentingan publik.

Dominasi rating tersebut memunculkan beragam pandangan. Sebagian pihak menilai bahwa rating hanya merupakan data

yang merefleksikan perilaku menonton masyarakat, sehingga persoalan utamanya terletak pada praktik industri penyiaran. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menganggap ketergantungan pada rating sebagai masalah serius karena dapat mengganggu keseimbangan fungsi penyiaran. Kelompok ini mendorong adanya alternatif, seperti pembentukan lembaga audit independen untuk survei kepemirsaaan atau penyediaan data pembanding agar pelaku industri tidak hanya bergantung pada satu sumber pengukuran.

Permasalahan rating ini juga menjadi perhatian KPI. Sebagai representasi kepentingan publik, KPI memiliki kewajiban memastikan program televisi tetap berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyiaran tidak seharusnya semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga harus berlandaskan kepentingan publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kuatnya pengaruh kepentingan bisnis dan politik menyebabkan upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, KPI memerlukan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam menilai kualitas siaran. Data tersebut penting untuk mendukung pengambilan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi guna meningkatkan mutu siaran televisi di Indonesia.

Pengumpulan data yang dibutuhkan harus mencakup berbagai aspek, antara lain isi program, cara penyajian, tingkat keakuratan informasi, serta kepatuhan terhadap etika dan norma yang berlaku. Dengan ketersediaan data yang lengkap, KPI dapat melakukan evaluasi secara lebih mendalam dan memberikan masukan yang konstruktif kepada lembaga penyiaran, sehingga perbaikan kualitas program dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menghasilkan data yang valid dan

terukur, diperlukan instrumen khusus, salah satunya melalui pengembangan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV).

IKPSTV merupakan program pengukuran yang dilaksanakan oleh KPI sejak tahun 2015 untuk menilai mutu program siaran televisi secara sistematis dan menyeluruh. Seiring waktu, cakupan dan metodologi IKPSTV terus mengalami perkembangan, mulai dari pelaksanaan awal pada 2015 hingga pengukuran berskala nasional pada tahun 2025. IKPSTV melibatkan perguruan tinggi, informan ahli di berbagai provinsi, serta memperluas jumlah stasiun televisi yang dinilai sebagai upaya untuk menggambarkan kualitas siaran secara lebih representatif. Pelaksanaan IKPSTV selaras dengan tugas dan fungsi KPI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3-SPS), yang berdampak pada kualitas siaran, perlindungan kepentingan publik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, KPI memiliki tugas menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

IKPSTV berperan sebagai mekanisme operasional untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut dengan menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan dalam pengawasan, penyusunan rekomendasi, serta memperkuat kolaborasi antara regulator, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat. Data IKPSTV juga mendukung KPI dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan penyiaran agar tetap selaras dengan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam undang-

undang. Pelaksanaan IKPSTV didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, kebutuhan akan data empiris guna memantau kondisi kualitas siaran secara berkala, sehingga kebijakan dan rekomendasi pengawasan dapat disusun berbasis data. Kedua, peran KPI tidak hanya terbatas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator perbaikan ekosistem penyiaran, sehingga diperlukan riset independen untuk mendukung langkah korektif. Ketiga, keterlibatan akademisi serta jaringan daerah memberikan legitimasi, cakupan wilayah, dan kedalaman analisis yang dibutuhkan untuk intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Pelaksanaan IKPSTV secara berkelanjutan sejak 2015 memungkinkan KPI memetakan perkembangan kualitas siaran serta menilai efektivitas kebijakan regulatif dan advokasi dari waktu ke waktu. Selain itu, IKPSTV ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pengukuran indeks ini menyediakan tolok ukur objektif yang mendorong lembaga penyiaran untuk terus melakukan perbaikan program secara berkesinambungan. IKPSTV juga menyediakan data dan indikator yang dapat dijadikan acuan oleh industri penyiaran dalam meningkatkan standar produksi, kualitas isi, dan etika penyiaran, sehingga program yang dihasilkan lebih edukatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Perubahan nilai indeks, baik peningkatan maupun penurunan, menjadi sinyal yang jelas bagi pengelola program, pengiklan, dan regulator mengenai aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan, sehingga mendorong pergeseran praktik penyiaran dari sekadar mengejar rating menuju penekanan pada kualitas dan tanggung jawab publik.

Lebih jauh, IKPSTV memberikan kontribusi langsung terhadap upaya peningkatan literasi media dan kecerdasan pemirsa dengan mendorong hadirnya konten yang informatif, akurat, dan mendidik. Peningkatan kualitas program memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang lebih dapat dipercaya, penyajian narasi yang lebih berimbang, serta tayangan edukatif yang memperkuat kemampuan kritis dalam menilai pesan media. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan publik maupun pribadi berdasarkan informasi yang sehat, sekaligus mengurangi penyebaran disinformasi dan praktik sensasionalisme yang merugikan publik.

Penelitian ini dirancang sebagai riset periodik atau longitudinal dengan melibatkan responden yang sama pada setiap periode pengukuran, yang selanjutnya disebut sebagai informan. Pendekatan longitudinal memungkinkan penelitian untuk memantau perubahan dan perkembangan kualitas program siaran televisi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dengan melibatkan informan yang sama pada setiap periode, konsistensi data dapat terjaga sehingga hasil pengukuran antarwaktu dapat dibandingkan secara lebih akurat.

Riset panel ini bertujuan untuk membandingkan kondisi kualitas program siaran televisi dari satu periode ke periode berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi tren serta pola perubahan kualitas siaran, termasuk menilai adanya peningkatan atau penurunan mutu program, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini bersifat evaluatif terhadap kualitas isi program siaran televisi dan dilakukan oleh informan ahli yang memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang penyiaran. Keterlibatan

para ahli ini diharapkan menghasilkan penilaian yang objektif dan berlandaskan standar mutu yang tinggi. Informan ahli melakukan penilaian terhadap berbagai aspek program siaran, antara lain isi konten, cara penyajian, serta dampak tayangan terhadap khalayak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan kuesioner yang memuat indikator-indikator penilaian kualitas program siaran televisi. Kuesioner dirancang secara sistematis dan cermat sebagai instrumen pengukuran yang valid dan reliabel, sehingga mampu mengukur mutu program siaran secara komprehensif pada setiap lembaga penyiaran. Butir-butir pertanyaan disusun untuk mencakup aspek-aspek utama kualitas siaran, sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan dasar evaluasi yang kuat sekaligus memberikan masukan bagi lembaga penyiaran dalam upaya peningkatan kualitas tayangan. Selanjutnya, hasil penilaian para informan diperdalam melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Hasil akhir pengukuran IKPSTV kemudian dipublikasikan melalui kegiatan ekspos dan diseminasi di berbagai kota. Penilaian IKPSTV memiliki skala 1 s.d 4 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Penilaian IKPSTV beserta dengan kategorinya

No.	Nilai IKPSTV	Kategori
1.	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Berkualitas
2.	2,00 – 2,99	Tidak Berkualitas
3.	3,00 – 3,99	Berkualitas (Standar Minimal KPI)
4.	4,00	Sangat Berkualitas

Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Pelaksanaan IKPSTV Tahun 2025 melibatkan 21 lembaga penyiaran televisi, yaitu: ANTV, BTV, CNN Indonesia, Garuda

TV, GTV, Indosiar, iNews, JPM, Kompas TV, MDTV, Mentari TV, Metro TV, MNCTV, Moji, RCTI, RTV, SCTV, Trans7, Trans TV, tvOne, dan TVRI.

Pemilihan 21 stasiun televisi tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah siaran serta durasi siaran selama 24 jam. Dengan karakteristik tersebut, stasiun televisi yang dipilih dinilai mampu merepresentasikan keragaman populasi penyiaran nasional. Pendekatan ini memungkinkan pengurangan kebutuhan daftar lengkap seluruh stasiun televisi, efisiensi biaya, dan waktu pengumpulan data, serta tetap menjaga prinsip probabilitas melalui prosedur pengambilan sampel secara acak pada setiap tahap. Selain itu, alokasi sampel yang proporsional antarstrata meningkatkan daya generalisasi hasil indeks dibandingkan penggunaan sampel nonprobabilitas.

Penentuan sampel program siaran dalam IKPSTV Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan. **Pertama**, populasi penelitian mencakup seluruh program siaran dari delapan kategori program yang ditayangkan oleh 21 stasiun televisi berjaringan selama 24 jam dalam periode dua bulan, yaitu Mei hingga Desember 2025. Penetapan rentang waktu tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas siaran dalam berbagai kondisi penyiaran.

Kedua, penelitian menggunakan sampel program televisi yang ditarik secara acak. Teknik sampling acak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap program dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel, sehingga hasil penelitian diharapkan representatif dan bebas dari bias. Dengan demikian, sampel yang diperoleh dapat mencerminkan kualitas program siaran televisi secara umum.

Ketiga, metode penarikan sampel dilakukan dengan prosedur *multistage sampling*. Teknik ini melibatkan beberapa

tahapan pemilihan sampel untuk menyederhanakan proses pengambilan sampel dari populasi yang besar dan beragam. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi serta ketepatan dalam pemilihan sampel penelitian.

Keempat, peneliti menentukan sumber konten berdasarkan delapan kategori program yang ditayangkan oleh 21 stasiun televisi. Pada tahap ini, seluruh program dalam kategori yang telah ditetapkan diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai bagian dari populasi penelitian, sehingga seluruh jenis program terwakili dalam sampel.

Kelima, penentuan tanggal penayangan sampel dilakukan secara acak melalui tahapan pemilihan bulan, minggu, dan hari. Pendekatan ini bertujuan agar sampel program mencerminkan variasi kondisi penyiaran yang berbeda dan tidak terfokus pada waktu tertentu, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan dinamika siaran televisi secara lebih komprehensif.

Kualitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemenuhan standar yang ditetapkan oleh KPI dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), serta Standar Program Siaran (SPS). Penelitian ini tidak menilai aspek estetika atau teknis artistik program, melainkan berfokus pada kualitas isi siaran sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pengukuran IKPSTV dilakukan menggunakan metode *peer review* dengan melibatkan responden ahli sebagai informan. Data dikumpulkan dari para ahli yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu dan praktik penyiaran televisi, sehingga penilaian yang dihasilkan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memperkuat evaluasi mutu siaran televisi nasional, IKPSTV Tahun 2025 dilaksanakan melalui kemitraan

strategis antara 33 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan 33 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan pengukuran kualitas siaran yang objektif, partisipatif, dan berbasis akademik.

Setiap KPID di 33 provinsi bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra pelaksana, yang berperan dalam pelaksanaan survei, analisis tayangan, serta penyusunan masukan dan rekomendasi kebijakan penyiaran. Berikut disajikan daftar kemitraan KPID dan perguruan tinggi yang terlibat dalam pelaksanaan IKPSTV Tahun 2025.

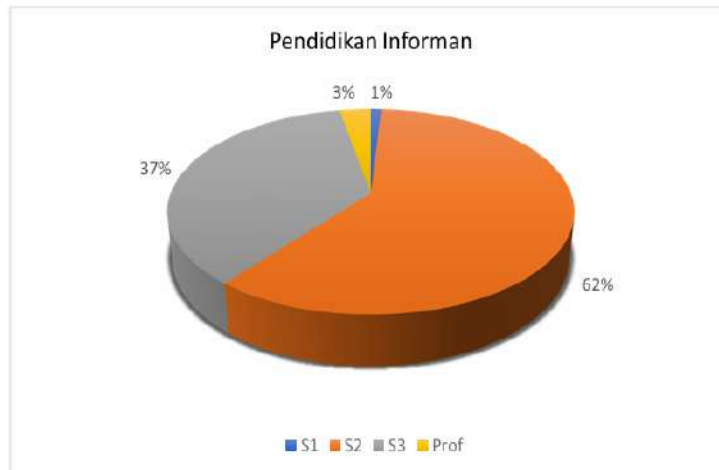
Tabel 2. Daftar KPID dan Perguruan Tinggi

No.	Provinsi	Perguruan Tinggi
1.	KPID Nusa Tenggara Timur	Universitas Nusa Cendana
2.	KPID Sulawesi Tenggara	Universitas Halu Oleo
3.	KPID Papua	Universitas Muhammadiyah Papua
4.	KPID Kalimantan Barat	Universitas Tanjungpura
5.	KPID Sulawesi Barat	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
6.	KPID Sumatera Utara	Universitas Sumatera Utara
7.	KPID Bengkulu	Universitas Bengkulu
8.	KPID Aceh	Universitas Syiah Kuala
9.	KPID Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo
10.	KPID DIY	UIN Sunan Kalijaga
11.	KPID Maluku Utara	Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN Ternate)
12.	KPID Bali	Universitas Udayana
13.	KPID Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
14.	KPID Sumatera Barat	Universitas Andalas
15.	KPID Bangka Belitung	Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
16.	KPID Kalimantan Timur	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
17.	KPID Sulawesi Selatan	Universitas Hasanuddin
18.	KPID Maluku	Universitas Pattimura
19.	KPID Sulawesi Tengah	Universitas Tadulako
20.	KPID Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
21.	KPID Jambi	Universitas Jambi
22.	KPID Nusa Tenggara Barat	Universitas Mataram
23.	KPID Riau	Universitas Riau
24.	KPID Kepulauan Riau	Universitas Maritim Raja Ali Haji
25.	KPID Jawa Timur	Universitas Negeri Surabaya
26.	KPID Sumatera Selatan	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
27.	KPID Papua Barat	Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
28.	KPID Kalimantan Tengah	UIN Palangka Raya
29.	KPID DKI Jakarta	UPN Veteran Jakarta
30.	KPID Kalimantan Selatan	Universitas Lambung Mangkurat
31.	KPID Sulawesi Utara	Universitas Sam Ratulagi
32.	KPID Lampung	Universitas Lampung
33.	KPID Jawa Barat	Universitas Padjadjaran

Dalam pelaksanaan penelitian IKPSTV Tahun 2025, informan ahli yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Dari total 99 informan, sebanyak 1% merupakan lulusan sarjana (S1), sementara mayoritas informan, yaitu 62%, berpendidikan magister (S2). Selain itu, 37% informan memiliki gelar doktor (S3), yang mencerminkan tingkat penguasaan

keilmuan yang mendalam terhadap bidang kajian yang diteliti. Terdapat pula 3% informan yang menyandang gelar profesor, menunjukkan tingkat kompetensi dan keahlian yang sangat tinggi dalam disiplin ilmu masing-masing.

Gambar 1. Pendidikan Informan



Seluruh informan tersebut berasal dari 33 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatan akademisi dari beragam institusi pendidikan tinggi ini memperkaya kualitas data penelitian melalui sudut pandang yang beragam dan komprehensif. Variasi latar belakang pendidikan informan berkontribusi signifikan dalam menghasilkan temuan penelitian yang lebih mendalam serta representatif terhadap kondisi penyiaran nasional.

Tingginya proporsi informan dengan jenjang pendidikan S2 dan S3 dalam survei IKPSTV didasarkan pada kebutuhan akan kemampuan analitis, metodologis, dan konseptual yang kuat dalam menilai mutu siaran. Informan dengan pendidikan pascasarjana umumnya memiliki pengalaman riset yang lebih matang, pemahaman yang mendalam mengenai teori komunikasi dan regulasi penyiaran, serta kemampuan berpikir kritis dalam mengaitkan temuan empiris dengan kerangka normatif, seperti P3-SPS maupun standar KPI. Dengan

kapasitas tersebut, penilaian yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kontekstual, sehingga meningkatkan tingkat reliabilitas dan validitas hasil survei serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis dalam mendukung perumusan kebijakan publik dan pengembangan industri penyiaran.

Kemitraan antara akademisi dan regulator daerah ini menjadi landasan penting dalam upaya menjaga kualitas siaran televisi agar tetap edukatif, informatif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Melalui dukungan tersebut, IKPSTV Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi penyiaran di Indonesia sekaligus mendorong peningkatan standar mutu industri media nasional.

IKPSTV Tahun 2025 dilaksanakan satu kali dengan diawali penilaian oleh informan ahli terhadap sampel tayangan melalui aplikasi Sistem Informasi Riset Indeks Kualitas (<https://sirinkas.kpi.go.id/>). Penilaian menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat kesetujuan terhadap indikator kualitas program siaran televisi. Skor yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi indeks kualitas guna mengklasifikasikan program siaran dari kategori sangat tidak berkualitas hingga sangat berkualitas.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pelaksanaan FGD IKPSTV yang diselenggarakan pada 17 September 2025 di Kantor KPI Pusat secara *hybrid*. FGD bertujuan memperkuat hasil kuantitatif melalui pendalaman kualitatif tanpa mengubah nilai indeks yang telah diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-method*), yaitu mengombinasikan survei kuantitatif dan FGD kualitatif berbasis data primer dan sekunder untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan objektif.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan membagi peserta ke dalam delapan kelompok sesuai kategori program siaran, yaitu Berita, Infotainment, Wisata Budaya, Sinetron, Anak, Religi, Talkshow, dan Variety Show. Setiap kelompok diikuti oleh sekitar 12–13 informan yang berpartisipasi secara daring. Kegiatan FGD didampingi oleh Pengendali Lapangan dari KPID, narasumber metodologi, Komisioner KPI Pusat, serta perwakilan staf Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI).

Gambar 2. Hasil IKPSTV Tahun 2025



Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Berdasarkan hasil pengukuran IKPSTV Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2, diperoleh nilai IKPSTV sebesar 3,29. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas program siaran televisi telah memenuhi standar KPI dan sekaligus merupakan nilai indeks tertinggi sepanjang pelaksanaan IKPSTV. Perbandingan hasil indeks kualitas program siaran TV tahun 2017-2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2017-2025

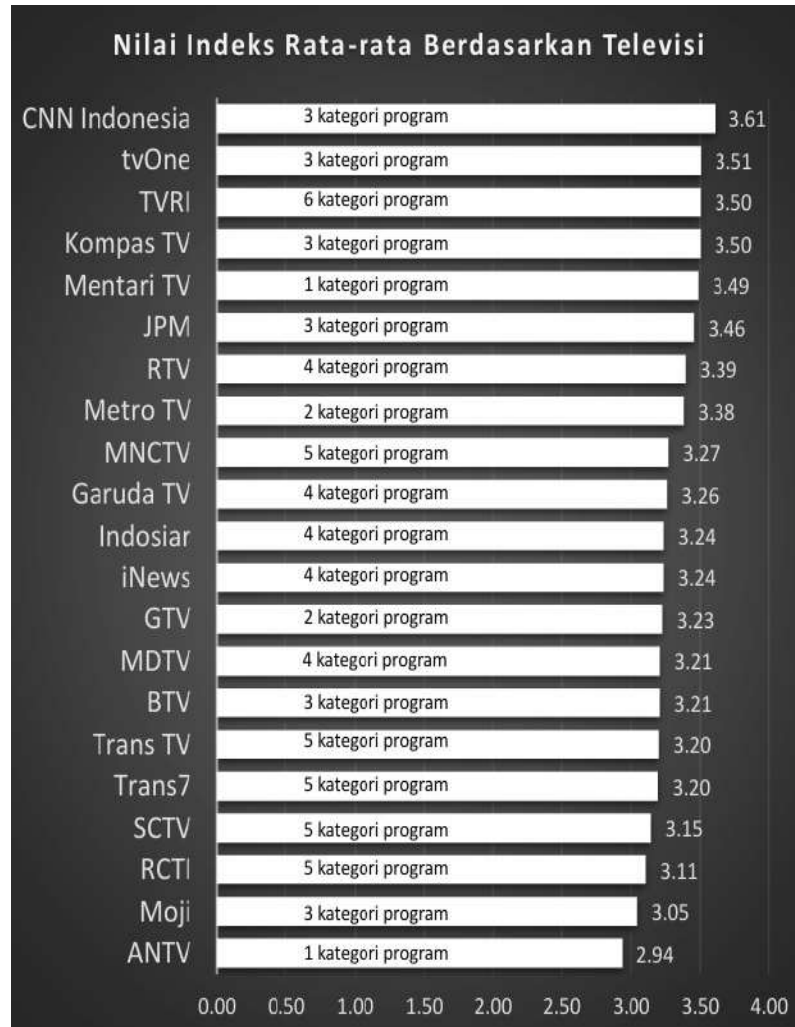


Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Hasil perbandingan IKPSTV periode 2017–2025 menunjukkan tren peningkatan kualitas siaran secara umum. Pada fase awal (2017–2019), nilai indeks masih berada di bawah angka 3,00 dengan fluktuasi kecil antarperiode. Peningkatan signifikan mulai terlihat pada tahun 2020, ketika indeks melampaui angka 3,00 dan mencapai 3,21, menandai perbaikan kualitas siaran yang cukup substansial. Meskipun sempat mengalami penurunan tipis pada beberapa periode berikutnya, indeks cenderung stabil pada kisaran di atas standar minimal KPI. Puncak capaian terjadi pada tahun 2025 dengan nilai indeks sebesar 3,29, yang merupakan skor tertinggi sepanjang pelaksanaan IKPSTV. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas program siaran televisi nasional, meskipun masih disertai fluktuasi kecil dari waktu ke waktu.

Penilaian indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan Lembaga penyiaran tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4. Perbandingan Nilai Indeks Rata-Rata Lembaga Penyiaran Tahun 2025



Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Perbandingan nilai indeks rata-rata berbagai stasiun televisi di Indonesia menunjukkan perbedaan persepsi kualitas atau kinerja masing-masing kanal, yang dipengaruhi oleh variasi jumlah dan jenis kategori program yang dinilai berdasarkan indikator tertentu. CNN Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan skor 3,61, yang mencerminkan tingkat kualitas dan kepercayaan publik yang relatif lebih tinggi dibandingkan stasiun

televisi lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh tvOne dengan skor 3,51, disusul oleh TVRI dan Kompas TV yang masing-masing memperoleh nilai 3,50. Selain itu, Mentari TV dan JPM juga mencatat capaian indeks di atas 3,45. Hasil ini mengindikasikan bahwa kanal-kanal yang berfokus pada konten berita dan informasi publik cenderung memperoleh penilaian yang lebih positif.

Sebaliknya, beberapa stasiun televisi yang dominan menayangkan program hiburan, seperti Moji sebesar 3,05, RCTI dengan nilai 3,11, dan ANTV dengan skor 2,94 berada pada peringkat terbawah. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas konten maupun relevansi program terhadap kebutuhan pemirsa. Meskipun demikian, rentang nilai indeks yang relatif sempit, yaitu antara 2,94 hingga 3,61, menunjukkan bahwa secara umum kinerja stasiun televisi berada pada kategori yang berdekatan. Temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi bagi pengelola media untuk meningkatkan mutu tayangan, memperkuat segmentasi audiens, serta merespons dinamika preferensi pemirsa secara lebih strategis.

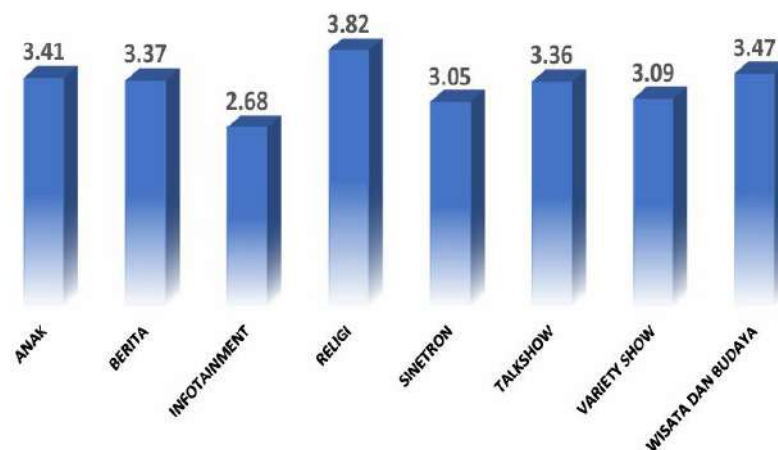
Pada gambar diatas, dapat terlihat Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Nilai rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) di atas 3 sebanyak 20 Lembaga Penyiaran yaitu BTV, CNN Indonesia, Garuda TV, GTV, Indosiar, iNews, JPM, Kompas TV, MDTV, Mentari TV, Metro TV, MNCTV, Moji, RCTI, RTV, SCTV, Trans7, Trans TV, tvOne, dan TVRI. Sedangkan terdapat 1 Lembaga Penyiaran dengan Nilai rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) di bawah 3 yaitu ANTV.

Selain melakukan penilaian indeks kualitas terhadap lembaga penyiaran televisi, KPI juga melakukan penilaian indeks

terhadap kualitas per kategori program dengan target 6 dari 8 kategori program yang di nilai.

Dari hasil survei Indeks Kualitas Program Siaran berdasarkan kategori program tahun 2025 diperoleh 7 dari 8 kategori program yang memenuhi nilai indeks rata-rata di atas 3 yaitu kategori program Religi (3.82), kategori program Wisata dan Budaya (3.47), kategori program anak (3.41), kategori program berita (3.37), kategori program Talkshow (3.36), kategori program Variety Show (3.09) dan kategori program Sinetron (3.05). Sedangkan terdapat 1 kategori program dari 8 kategori program yang mendapatkan nilai indeks rata-rata di bawah 3 yaitu kategori program Infotainment (2.68). Indeks rata-rata kategori program siaran televisi tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Indeks Kategori Program Siaran TV Tahun 2025



Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat dari delapan kategori program yang dievaluasi, tujuh kategori telah melampaui standar minimal KPI sebesar 3,00. Hasil penilaian menunjukkan perbedaan kualitas yang cukup signifikan, program religi memperoleh nilai tertinggi dengan indeks sebesar 3,82, yang

menunjukkan kualitas sangat baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tayangan yang edukatif dan selaras dengan nilai-nilai sosial. Kategori wisata dan budaya juga mencatat kinerja positif dengan nilai indeks 3,47, mencerminkan konsistensi dalam menyajikan konten yang informatif dan mendidik. Sebaliknya, kategori infotainment berada pada posisi terendah dengan indeks 2,68, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menekan unsur sensasionalisme serta meningkatkan akurasi dan kualitas informasi. Sementara itu, kategori sinetron mencatat nilai indeks 3,05. Meskipun mengalami peningkatan, kualitas tayangan pada kategori ini masih memerlukan dorongan perbaikan lebih lanjut karena belum sepenuhnya dapat dijadikan rujukan utama dan masih menyisakan berbagai catatan kritis.

Capaian IKPSTV 2025 juga diperkuat oleh pengembangan metodologi serta perluasan partisipasi yang meningkatkan validitas temuan dan relevansinya bagi perumusan kebijakan nasional. Keterlibatan informan dari lebih banyak provinsi dan stasiun televisi menjadikan IKPSTV sebagai indikator yang lebih representatif bagi industri penyiaran maupun pembuat kebijakan. Sejalan dengan target RPJMN untuk meningkatkan indeks hingga mencapai 3,35 pada tahun 2029, temuan ini merekomendasikan perlunya mempertahankan dan memperluas program peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyiaran, memperkuat mekanisme akuntabilitas editorial, serta merancang intervensi yang terukur dan berfokus pada kategori yang masih tertinggal agar peningkatan kualitas siaran dapat berkelanjutan dan selaras dengan target nasional.

Tabel 2. Sebaran Nilai Indeks Rata-Rata Kategori Program Dalam Lembaga Penyiaran

LEMBAGA PENYIARAN	ANAK	BERITA	INFO-TAINMENT	RELIGI	SINETRON	TALK-SHOW	VARIETY SHOW	WISATA BUDAYA	Nilai Indeks Rata-rata
CNN Indonesia		3.44		3.85		3.49			3.61
tvOne		3.39		3.79		3.42			3.51
TVRI	3.65	3.33		3.84		3.36	3.26	3.44	3.50
Kompas TV		3.50				3.52		3.45	3.50
Mentari TV	3.49								3.49
JPM	3.55	3.46				3.35			3.46
RTV	3.18	3.19		3.80		3.17			3.39
Metro TV		3.35				3.43			3.38
MNCTV	3.40	3.21	2.54	3.81	3.34				3.27
Garuda TV		3.42	2.83			3.45		3.65	3.26
Indosiar		3.48	2.65	3.83	3.05				3.24
iNews		3.32	2.62	3.88		3.47			3.24
GTV	3.24	3.21							3.23
MDTV	3.59	3.12			2.98		3.14		3.21
BTv	3.35	3.45	2.82						3.21
Trans TV		3.42	2.76	3.85		2.93	3.01		3.20
Trans7	3.37	3.37	2.74				3.12	3.46	3.20
SCTV		3.45	2.55	3.74	2.90		2.85		3.15
RCTI	3.27	3.38	2.55		3.16		3.06		3.11
Moji		3.50	2.68		2.97				3.05
ANTV					2.94				2.94
Indeks Rata-rata	3.41	3.37	2.68	3.82	3.05	3.36	3.09	3.47	3.29

Sumber: E-Book IKPSTV, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (2025)

Ditinjau dari aspek kelembagaan, CNN Indonesia dan tvOne mencatat nilai indeks total tertinggi masing-masing sebesar 3,61 dan 3,51, meskipun keduanya hanya menayangkan sebagian kategori program. TVRI menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan cakupan kategori yang lebih luas dan nilai total 3,50, yang mencerminkan konsistensi dalam penyediaan konten edukatif dan kebudayaan. Selain itu, Kompas TV dan JPM juga menampilkan performa yang cukup baik, khususnya pada kategori Berita, Talkshow, dan Anak. Sebaliknya, ANTV mencatat nilai indeks total terendah sebesar 2,94, dengan hanya menayangkan satu kategori program, yaitu Sinetron, yang berdasarkan hasil evaluasi juga memperoleh nilai kualitas yang relatif rendah.

Secara umum, meskipun menunjukkan kemajuan yang positif, upaya peningkatan kualitas siaran masih perlu terus dilakukan, khususnya pada kategori infotainment, sinetron, dan variety show yang cenderung mengalami fluktuasi kualitas. Untuk itu, diperlukan penguatan pengawasan konten serta intervensi editorial yang lebih efektif agar kategori-kategori tersebut mampu mencapai standar kualitas yang lebih tinggi.

Komisi Penyiaran Indonesia juga secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian IKPSTV, khususnya pada kategori Infotainment dan Sinetron yang dalam beberapa tahun terakhir masih sering memperoleh penilaian di bawah standar KPI. Untuk meningkatkan kualitas program Infotainment dan Sinetron, KPI dapat memberikan teguran maupun sanksi kepada stasiun televisi yang menayangkan program yang tidak memenuhi P3-SPS karena langkah tersebut bertujuan untuk mendorong lembaga penyiaran agar melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Selain itu, KPI dapat melakukan pembinaan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan atau workshop rutin yang berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap standar kualitas penyiaran.

Di sisi lain, peningkatan kualitas konten penyiaran perlu berjalan seiring dengan prinsip *brand safety*, yang menjadi salah satu fondasi utama keberlanjutan ekonomi lembaga penyiaran sebagai entitas bisnis. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kepercayaan publik serta memahami kebutuhan masyarakat terhadap konten siaran yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan survei indeks kualitas program siaran televisi ada beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat diantaranya yaitu:

Faktor Pendukung:

1. Ketersediaan instrumen IKPSTV sebagai acuan objektif
IKPSTV telah menjadi instrumen berbasis penilaian ahli yang mampu memotret kualitas isi siaran secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi kuantitas pemirsas, tetapi juga dari aspek kepentingan publik, etika, dan mutu konten.
2. Komitmen KPI dalam pembinaan dan pengawasan
KPI secara aktif melakukan pembinaan melalui Sekolah P3-SPS, sosialisasi regulasi, diseminasi hasil IKPSTV, serta pemberian teguran dan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar P3-SPS.
3. Dukungan akademisi dan praktisi industri
Keterlibatan akademisi, asosiasi penyiaran, serta pelaku industri dalam forum diskusi IKPSTV memperkuat legitimasi indeks dan membuka ruang pertukaran gagasan untuk perbaikan kualitas konten secara berkelanjutan.
4. Kesadaran pengiklan terhadap *brand safety*
Meningkatnya kesadaran pengiklan mengenai pentingnya *brand safety* mendorong sebagian pelaku periklanan mulai mempertimbangkan aspek kualitas program, bukan semata-mata rating.
5. Kolaborasi antar lembaga
Terbukanya peluang kerja sama KPI dengan BPS, Bappenas, Komdigi, serta asosiasi pengiklan dan penyiaran menjadi faktor penting dalam penguatan metodologi, validitas data, dan integrasi IKPSTV dalam kebijakan publik.
6. Respons positif dari lembaga penyiaran tertentu
Sejumlah stasiun televisi mulai menjadikan hasil IKPSTV sebagai rujukan internal dalam evaluasi program, khususnya dalam peningkatan kualitas infotainment dan sinetron.

Faktor Hambatan:

1. Dominasi rating Nielsen sebagai *currency* industri
Industri pertelevisian masih sangat bergantung pada rating Nielsen sebagai dasar utama penentuan belanja iklan, sehingga aspek kualitas konten belum menjadi pertimbangan utama dalam keputusan bisnis.
2. Ketimpangan distribusi belanja iklan
Belanja iklan cenderung terpusat pada program dengan rating tinggi, termasuk pada kategori yang dinilai kurang berkualitas seperti infotainment, sementara program berkualitas justru minim dukungan iklan.
3. Paradoks antara kualitas dan keberlanjutan program
Terdapat program yang memiliki indeks kualitas tinggi namun akhirnya dihentikan karena tidak mendapat iklan, sementara program yang sering mendapat sanksi tetap bertahan karena memiliki rating tinggi.
4. Tekanan bisnis industri penyiaran
Pergeseran konsumsi media ke platform digital, fragmentasi audiens, dan meningkatnya biaya produksi membuat lembaga penyiaran lebih fokus pada konten yang cepat menarik perhatian, meskipun berisiko menurunkan kualitas.
5. Belum optimalnya pemanfaatan IKPSTV oleh pengiklan
Sebagian besar pengiklan dan asosiasi periklanan belum sepenuhnya menjadikan IKPSTV sebagai rujukan utama dalam strategi penempatan iklan.
6. Kualitas SDM dan proses produksi
Produksi sinetron dan infotainment yang berlangsung panjang dan padat sering kali menguras energi kreatif, sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai edukatif, etika, dan kepentingan publik.
7. Keterbatasan instrumen pengukuran alternatif

Hingga saat ini belum tersedia sistem pengukuran kepemirsaaan nasional yang mampu menyaingi Nielsen dan secara simultan memasukkan variabel kualitas dan kepentingan publik.

Berdasarkan temuan indeks tersebut, sejumlah rekomendasi dapat dirumuskan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu tayangan pada lembaga penyiaran di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi dan kredibilitas informasi yang disajikan di semua jenis program, dengan lebih menekankan pada verifikasi fakta dan sumber yang tepercaya.
2. Memastikan bahwa semua program siaran, terutama infotainment dan variety show, mematuhi standar etika yang lebih ketat, termasuk menghormati privasi individu dan menghindari sensasionalisme.
3. Memperbanyak program yang memberikan dampak edukatif, mendorong nilai-nilai positif, dan menghindari muatan kekerasan, seksualitas, atau sensasionalisme yang dapat merugikan penonton.
4. Memastikan bahwa program-program yang memiliki potensi untuk menampilkan kekerasan atau konten seksual sesuai dengan klasifikasi umur dan standar penyiaran yang berlaku.
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas host atau presenter agar mereka dapat memandu dan menyajikan informasi dengan lebih objektif, berimbang, dan berbasis data.
6. Mendorong lembaga penyiaran untuk menghindari ketergantungan pada konten yang tidak terverifikasi.

7. Melakukan evaluasi secara periodik untuk memastikan program-program tetap memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas konten.
8. Meningkatkan kesadaran bahwa penyiaran harus lebih mengutamakan kepentingan publik dan memberikan dampak positif pada pemirsa, dengan memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman budaya.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kualitas penyiaran televisi dapat terus meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, serta memperkuat peran media sebagai sumber informasi yang terpercaya dan mendidik.

2. Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 8,816,210,000

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan isi siaran. Untuk mencapai cita-cita penyiaran yang ideal dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 Ayat 2 Bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) terhadap lembaga penyiaran dalam proses produksi dan penayangan program siarannya. Sebagai wujud untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Penyiaran tersebut, KPI melakukan proses pemantauan langsung terhadap seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Selama tahun 2025, KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 41 LP Televisi Digital, 5 LP Televisi Berlangganan dan 15 Radio Berjaringan. Total terdapat 61 Lembaga Penyiaran yang dipantau oleh KPI sampai dengan bulan Desember.

Berikut ini adalah daftar Lembaga Penyiaran yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia selama tahun 2025:

Bulan	Lembaga Penyiaran yang Diawasi				Total
	LP Digital		LP Berlangganan	LP Radio	
Januari - Desember	1. Indosiar 2. SCTV 3. Net / MDTV 4. Metro TV 5. ANTV 6. Kompas TV 7. Trans TV 8. Trans 7 9. TVRI I 10. RTV 11. TV One 12. I News 13. MNC TV 14. RCTI 15. GTV 16. JPM TV	21. Mentari TV 22. Inspira TV 23. Nusantara TV 24. JP TV 25. BadarTV/ BRTV 26. BN TV 27. Smile TV 28. BBS TV 29. Magna Channel 30. UG TV 31. Betawi TV 32. E Channel 33. TV MU 34. TVRI World 35. Sport One	1. My Republik 2. First Media 3. Transvision 4. MNC Vision 5. K-Vision	1. Global FM 2. RDI 3. I Radio 4. RRI Pro 1 Fm 5. RRI Pro 2 FM 6. RRI Pro 3 FM 7. Gen FM 8. Female FM 9. Hardrock FM 10. Delta FM 11. Sonora FM 12. Trax FM 13. Elshinta FM 14. Prambors FM 15. MNC (Sindo) Trijaya	61 LP
	17. My TV 18. CNN Indonesia 19. Moji 20. BTV	36. CNBC Indonesia 37. TVRI Sport 38. El Shinta 39. DAAI TV 40. K TV 41. Gramedia TV			

Televisi digital yang dimaksud merupakan televisi (TV) yang bermigrasi dari siaran analog ke digital sebanyak 18 TV yang dipantau selama 24 jam dan 23 TV digital baru yang diantaranya 3 TV juga sudah dipantau selama 24 jam secara regular. Untuk 20 televisi digital baru lainnya, pemantauan dilakukan dengan sistem *random* dan *switching channel* secara berkala. Pemantauan mulai efektif dilakukan pada tahun 2025. Dimana sebelumnya dilakukan penelusuran tangkapan *channel* oleh tim IT KPI dan perubahan jadwal pada pengaturan skema kerja SDM Pemantauan. Selain itu, terdapat 5 provider televisi berlangganan yang dipantau oleh KPI yaitu First Media, My Republik, MNC Vision, Transvision, dan K-Vision.

Sedangkan untuk radio terdapat 15 radio yang dipantau, namun dalam praktiknya tidak semua radio dapat diakses

dengan baik. Hal ini disebabkan tidak stabilnya sistem yang digunakan untuk dapat mengakses siaran radio, sehingga seringkali jadwal yang sudah ditetapkan untuk memantau secara *random* siaran radio harus disesuaikan dengan realitas di lapangan, menyesuaikan dengan radio yang stabil penerimaan sinyalnya dan dapat diakses dengan baik saat itu. Untuk televisi berlangganan dan radio berjaringan tidak dipantau bersamaan, melainkan dipilih secara acak (*random*) dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing chanel siaran.

Dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Lembaga Penyiaran di atas, KPI memiliki Tim Pengawasan Isi Siaran yang berjumlah 121 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 7 Tenaga Analis Penyelia (TA), 113 Tenaga Analis Pemantauan Langsung dan 18 orang Tim Visual Data yang juga membantu menyediakan bukti tayangan televisi dimana digunakan sebagai bukti adanya pelanggaran oleh Lembaga penyiaran.

Selama Tahun 2025 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengawasi 61 Lembaga Penyiaran. Namun di tahun 2025 Dari 61 lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI terdapat 1 lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi berupa sanksi administrative penghentian sementara yaitu program siaran “Xpose Uncensored” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan klarifikasi R-BO menampilkan muatan beberapa kegiatan dari para santri di Pondok Pesantren. Muatan tersebut terdapat beberapa deskripsi dan narasi yang dinilai merendahkan dan/atau melecehkan individua tau kelompok di lingkungan Pendidikan (pesantren).

Atas sanksi yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan, klarifikasi (pemeriksaan pelanggaran), mediasi dan tindak lanjut administratif lainnya. Pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tersebut dilakukan merupakan salah satu bentuk sikap proses pendekatan dengan cara memberikan dengan cara memberikan bimbingan, arahan, serta membentuk dinamika diskusi dengan Lembaga Penyiaran.

Proses mediasi adalah mempertemukan dan mendengarkan keterangan beberapa pihak (LP) yang bersengketa dan dalam hal ini KPI bertindak sebagai penengah (mediator). Pemeriksaan pelanggaran atau klarifikasi biasanya dilakukan dengan cara memanggil lembaga penyiaran untuk menyampaikan keterangan atas konten program siaran yang dinilai terindikasi melanggar. Dan tindak lanjut administrasi lainnya adalah suatu bentuk sikap KPI Pusat melakukan sebuah penyampaian pesan atau imbauan dalam bentuk tertulis dalam menyikapi beberapa isu yang harus diperhatikan lembaga penyiaran.

3. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio dengan Pagu Anggaran sebesar Rp266.236.000.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu pemantauan siaran televisi dan radio secara langsung selama 24 jam dan pelayanan pengaduan masyarakat melalui media.

Layanan aduan masyarakat terkait konten siaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPI untuk mengelola keluhan, saran, gagasan, kritik, aspirasi dan berbagai informasi

terkait penyiaran untuk ditindaklanjuti oleh KPI sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu tugas KPI adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Tugas ini penting dalam rangka menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional, tugas tersebut dikoordinasikan penanganannya oleh bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
2. Kajian dan monitoring, verifikasi, sanggahan, kritik dan apresiasi, serta;
3. Menindaklanjuti aduan yang memiliki *legal standing* untuk ditangani.

Adapun yang dimaksud dengan aduan yang memiliki "*legal standing*" adalah aduan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Jika tidak berkenaan dengan itu, maka KPI akan memasukkannya sebagai jenis aduan yang tidak memiliki *legal standing*. Dengan demikian, jenis aduan ini tidak termasuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran.

Dalam pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat KPI membuka dan menerima aduan Masyarakat terhadap Konten Siaran Televisi dan Radio melalui Sistem Informasi Pengaduan (SIP) dan berbagai media seperti Website SARAN, Mobile

SARAN, Instagram, Surat Masuk, Whatsapp, Facebook, Email, Twitter, SPAN Laporan!, Telepon dan Tatap Muka.

Berdasarkan hasil pengaduan Masyarakat yang masuk ke dalam Sistem Informasi Pengaduan (SIP) pada tahun 2025 diperoleh sebanyak 634 aduan. Tim Pengaduan melakukan interpretasi data, kategorisasi dan klasifikasi data aduan. Terdapat 316 aduan yang tidak sesuai/tidak ditemukan potensi pelanggaran P3SPS, jumlah tersebut didapatkan setelah dilakukan verifikasi aduan, analisa serta pengecekan tayangan dan diketahui bahwa aduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi aduan tidak jelas, aduan tidak lengkap, tidak mencantumkan waktu penayangan program dan isi aduan tidak sesuai. Setelah dianalisis, diketahui pula bahwa tayangan tersebut tidak berpotensi melanggar P3SPS.

Adapun hasil verifikasi pengaduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS sebanyak 318 aduan diproses secara *ticketing* melalui Sistem Informasi Pengaduan (SIP) untuk diteruskan ke Bidang Penjatuhan Sanksi dan diproses dalam rapat pemeriksaan Bidang Pengawasan Isi Siaran. Jika hasil temuan pengaduan terbukti benar melanggar P3SPS, maka pada tahap selanjutnya temuan tersebut akan menjadi pembahasan Komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisis terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3SPS. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat selama tahun 2025:

Tabel 1. Tindaklanjuti Pengaduan Tahun 2025

TINDAKLANJUT	TOTAL ADUAN
• Pengaduan Masuk	• 634
• Pengaduan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	• 318
• Pengaduan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	• 316

Dari 634 jumlah aduan yang masuk selama periode bulan Januari - Desember tahun 2025, saluran Website SARAN paling banyak mendapatkan aduan yaitu sebanyak 206 (32,5%) aduan. Saluran pengaduan lainnya yaitu Instagram sebanyak 172 (27,1%) aduan, Mobile SARAN sebanyak 4 (0,63%), Surat Masuk sebanyak 171 (26,9%) aduan, WhatsApp sebanyak 27 (9,6%) aduan, Facebook sebanyak 13 (2,05%) aduan, Email sebanyak 25 (3,94%) aduan, Twitter sebanyak 0 (0,0%) aduan, SP4N Laporkan! sebanyak 9 (1,4%) aduan, Telepon sebanyak 1 (0,1%) dan Tatap Muka sebanyak 6 (0,94%).

Sepanjang tahun 2025, seluruh aduan masyarakat telah ditindaklanjuti (100%) dan menghasilkan sanksi sebanyak 6 (enam) sanksi dari total 35 (tiga puluh lima) sanksi yang dikeluarkan KPI secara keseluruhan. Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI Pusat secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat).

B. Pengungkapan Capaian Output Strategis pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Selama TA 2025, output strategis yang dicapai oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pada output Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia/Diseminasi Penyiaran (BMB), terdapat realisasi

- netto sebesar Rp510.107.691,00 atau sebesar 96,39% dari pagu anggaran sebesar Rp529.202.000,00. Adapun atas output tersebut terlaksana melalui beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2025 di antaranya pelaksanaan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di berbagai kota.
- b. Pada output Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio (QAH), terdapat realisasi netto sebesar Rp236.284.530,00 atau sebesar 88,75% dari pagu anggaran sebesar Rp266.236.000,00. Adapun atas output tersebut terlaksana melalui beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2025 di antaranya: Dialog Tematik Upaya Pemenuhan Konten Lokal, Sosialisasi Penyiaran, Dialog Partisipasi Masyarakat di berbagai kota.
 - c. Pada output rekomendasi hasil pemeringkatan lembaga penyiaran televisi (PBM), terdapat realisasi netto sebesar Rp3.282.959.187,00 atau sebesar 89,15% dari pagu anggaran sebesar Rp3.682.712.000,00. Adapun atas output tersebut terlaksana melalui beberapa kegiatan selama TA 2025 di antaranya: Workshop Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV), Ekspos Hasil riset IKPSTV, Pendalaman IPI (Indeks Penyiaran Indonesia) Tahun 2025, dan Focus Group Roadmap Penyiaran.
 - d. Pada output Pengawasan Siaran Televisi dan Radio (QIC), terdapat realisasi netto sebesar Rp8.077.415.130,00 atau sebesar 91,62% dari pagu anggaran sebesar Rp 8.816.210.000,00. Adapun atas output tersebut terlaksana melalui beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2025 di antaranya: pemantauan konten siaran televisi dan radio, Bimbingan Teknis Sekolah P3SPS, serta apresiasi terhadap Lembaga Penyiaran (Anugerah Syiar

Ramadhan), Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA), dan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Awards).

C. Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN

Capaian output utama per fungsi APBN pada satuan kerja Komisi Penyiaran Indonesia adalah pada Fungsi Ekonomi (04), sebagaimana dirincikan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2025 dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LO

(1) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(2) **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(3) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(4) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode *First-In First Out* (FIFO) atau rata-rata tertimbang
 - b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2020 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Lainnya

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise</i> .	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I.	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal senilai Rp56.836.989.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan anggaran atau anggaran berjalan, selain itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, terdapat banyak dinamika atau perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2025

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Efisiensi	Anggaran setelah relaksasi	Anggaran setelah Restrukturisasi
Pendapatan				
PNBP	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
Belanja				
Belanja Pegawai	6.993.038.000	6.993.038.000	6.993.038.000	6.993.038.000
Belanja Barang	49.203.726.000	27.780.181.000	42.285.442.000	32.756.737.000
Belanja Modal	640.225.000	0	640.225.000	120.000.000
Jumlah Belanja	56.836.989.000	34.773.219.000	49.918.705.000	39.869.775.000

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp56.836.989.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tertanggal 24 Januari 2025, pagu anggaran setelah efisiensi pada Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia menjadi senilai Rp34.773.219.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2025, KPI Pusat mengajukan usulan relaksasi anggaran atas beberapa Rincian Output (RO) program Prioritas Nasional (PN) yang terdampak efisiensi anggaran di mana anggaran setelah relaksasi tersebut adalah senilai Rp49.918.705.000,00. Kemudian sehubungan dengan usulan revisi pagu DIPA SOTK Baru di lingkungan Kemenkomdigi TA 2025, Sekretariat Jenderal mengirimkan Nota Dinas untuk menindaklanjuti revisi sehubungan dengan Restrukturisasi SOTK Kemenkomdigi kepada satuan kerja yang ada di lingkungannya dimana anggaran KPI Pusat setelah revisi dan blokir anggaran terakhir adalah menjadi senilai Rp39.869.775.000,00. Berkaitan dengan dinamika tersebut, perubahan-perubahan anggaran setelah pagu awal sebagaimana tabel di atas ter-*update* dalam sistem SAKTI pada bulan Juli 2025, sehingga untuk kebutuhan data pembandingan dalam Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2025 (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025) menggunakan data pagu anggaran awal senilai Rp56.836.989.000,00.

B.1 Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember adalah sebesar Rp48.956.554,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Komisi Penyiaran Indonesia adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2024 (425911)	0	492.100	0
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian Tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2024 (425911)	0	714.454	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)	0	47.750.000	0
Jumlah	0	48.956.554	0

Adapun rincian perbandingan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun) %
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2023 (425911)		1.580.400	0,00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian		209.683	0,00

Tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2023 (425911)			
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit (425122)		52.000.000	0,00
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang barang bergerak berupa parabola sebanyak 1 (satu) unit (425122)		125.000	0,00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2024 (425911)	492.100		0,00
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian Tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2024 (425911)	714.454		0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)	47.750.000		0,00
Jumlah	48.956.554	53.915.083	9,40

B.2 Belanja

Realisasi Belanja (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.737.454.132,00 atau 79,25% dari anggaran belanja sebesar Rp52.662.290.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Realisasi Belanja Neto
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA			
Belanja Pegawai	17.604.749.000	16.621.075.000	94,41
Belanja Barang	34.937.541.000	25.000.495.132	71,56
Belanja Modal	120.000.000	115.884.000	96,57

JUMLAH BELANJA	52.662.290.000	41.737.454.132	79,25
----------------	----------------	----------------	-------

Realisasi belanja untuk periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.051.241.260,00 dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2024 atau penurunan sebesar 26,5%. Penurunan realisasi tersebut menindakanjuti sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp	%
Belanja Pegawai	16.621.075.000	7.352.537.740	9.268.537.260	126,06
Belanja Barang	25.000.495.132	48.520.406.252	-23.519.911.120	-48,47
Belanja Modal	115.884.000	915.751.400	-799.867.400	-87,35
JUMLAH BELANJA	14.305.680.160	22.115.309.622	-7.809.629.462	-26,5

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp16.621.075.000,0
0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing Rp16.621.075.000,00 dan Rp7.352.537.740,00 mengalami kenaikan sebesar 125,68% dari periode sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat pengembalian belanja

pegawai berupa Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) senilai Rp1.295.000,00, Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) senilai Rp771.000,00, Belanja Gaji Pokok PNS (511111) senilai Rp506,00 dan Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) senilai Rp95,00.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.006.383.564	1.918.109.577	4,60
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.393.673.294	1.369.202.100	1,79
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.651	22.218	-7,05
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	77.210.810	68.222.080	13,18
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14.828.776	13.472.284	10,07
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.500.000	45.500.000	0,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	134.089.000	107.058.000	25,25
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13.674.213	12.959.315	5,52
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60.905.220	57.863.580	5,26
511129	Belanja Uang Makan PNS	227.261.600	192.805.000	17,87
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	39.220.000	51.005.000	-23,11
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.989.086.866	50.654.986	9.749,15
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.462.449.595	38.443.200	8906,66
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	54.763	746	7240,88
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	251.468.539	0,00	0,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	66.597.134	0,00	0,00

511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	5.940.000	27,27
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	212.474.245	869.040	24349,31
511628	Belanja Uang Makan PPPK	789.689.750	5.402.000	14518,47
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	198.792.840	0,00	0,00
5121	Belanja Honorarium	2.899.888.000	2.899.888.000	0,00
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2.899.888.000	2.899.888.000	0,00
5122	Belanja Lembur	142.522.000	133.726.000	6,58
512211	Belanja Uang Lembur	94.350.000	133.726.000	-29,45
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	48.172.000	0,00	0,00
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	6.557.746.088	2.350.900.423	178,95
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.385.431.941	2.301.019.579	3,67
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4.172.314.147	49.880.844	8264,56
Realisasi Belanja (Bruto)		16.595.626.518	7.353.278.986	125,69
Pengembalian Belanja		2.066.601	741.246	178,80
Realisasi Belanja (Netto)		16.593.559.917	7.352.537.740	125,68

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp25.000.495.132,00

Realisasi Belanja Barang (netto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp25.000.495.132,00 dan Rp48.520.406.252,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 48,47% dari realisasi belanja barang periode sebelumnya, utamanya sehubungan dengan pelaksanaan Efisiensi Belanja selama periode Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan rincian realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
5211	Belanja Barang Operasional	3.104.671.057	5.760.640.800	-46,11
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.680.950.708	5.224.353.167	-48,68
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	91.413.868	40.715.260	124,52
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111.480.000	98.904.000	12,72
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	220.826.481	396.668.373	-44,33
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
5212	Belanja Barang Non Operasional	8.647.224.610	15.520.351.777	-44,28
521211	Belanja Bahan	791.234.330	1.607.744.943	-50,79
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6.546.410.780	12.083.234.846	-45,82
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.309.579.500	1.829.371.988	-28,41
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	0	0,00
5218	Belanja Barang Persediaan	397.321.362	1.032.410.400	-61,52
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	397.321.362	1.032.410.400	-61,52
5221	Belanja Jasa	9.912.085.221	8.665.271.470	14,39
522111	Belanja Langganan Listrik	669.867.689	751.920.385	-10,91
522112	Belanja Langganan Telepon	16.349.854	16.638.711	-1,74
522113	Belanja Langganan Air	19.248.336	20.979.944	-8,25
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	662.176.719	483.375.235	36,99

522131	Belanja Jasa Konsultan	0	123.235.000	0,00
522141	Belanja Sewa	2.869.780.000	3.132.483.832	-8,39
522151	Belanja Jasa Profesi	2.512.900.000	3.185.500.000	-21,11
522191	Belanja Jasa Lainnya	3.161.762.623	951.138.363	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
5231	Belanja Pemeliharaan	753.785.866	1.640.691.280	-54,06
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.377.121	640.683.907	-64,98
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	529.408.745	1.000.007.373	-47,06
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.666.198.636	14.207.874.756	-88,27
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.568.933.636	7.912.252.789	-80,17
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97.265.000	300.308.000	-67,61
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	5.995.313.967	-100,00
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	519.208.380	1.759.062.867	-70,48
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	519.208.380	1.759.062.867	-70,48
Realisasi Belanja (Bruto)		25.000.495.132	48.586.303.350	-48,54
<i>Pengembalian Belanja</i>		0	65.897.098	-100,00
Realisasi Belanja (Netto)		25.000.495.132	48.520.406.252	-48,47

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal

Rp115.884.000,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp115.884.000,00 dan Rp915.751.400,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar

87,35% dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja selama periode Tahun Anggaran 2025. Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	915.751.400	-100,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	450.772.400	-100,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	464.979.000	-100,00
5361	Belanja Modal Lainnya	115.884.000	0	0,00
536111	Belanja Modal Lainnya	115.884.000	0	0,00
Realisasi Belanja (Bruto)		115.884.000	915.751.400	-87,35
Pengembalian Belanja		0	0	0,00
Realisasi Belanja (Netto)		115.884.000	915.751.400	-87,35

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Realisasi Belanja (Bruto)	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Realisasi Belanja (Netto)	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
 Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp915.751.400,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Filing Cabinet Besi		58.800.000	-100,00
CCTV - Camera Control Television System		19.813.500	-100,00
Tablet PC		13.718.900	-100,00

Server		464.979.000	-100,00
Printer		3.800.000	-100,00
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		281.000.000	-100,00
Alat Penghancur Kertas		11.600.000	-100,00
Note Book		62.040.000	-100,00
Realisasi Belanja (Bruto)	0	915.751.400	-100,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Netto)	0	915.751.400	-100,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan**
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16
*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Bruto)	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Netto)	0	0	0,00

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan**
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Bruto)	0	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Netto)	0	0	0,00

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya
Rp115.884.000,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp115.884.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan karena terdapat pengembangan *software* komputer berupa aplikasi SMILED.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Aplikasi Sistem Informasi Riset Indeks Kualitas (SIRINKAS)	0	0	0,00
Pengembangan nilai <i>software</i> berupa aplikasi SMILED	115.884.000	0	0,00
Pengembangan nilai <i>software</i> berupa aplikasi BIS (Broadcasting Information System)	0	0	0,00

Aset Tetap Renovasi (Renovasi ruangan visual data dan server)	0	0	0,00
Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan SIP / SARAN (Sahabat Penyiaran)	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Bruto)	115.884.000	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0,00
Realisasi Belanja (Netto)	115.884.000	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar

Rp278.894.152,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp278.894.152,00 dan Rp335.045.804,00.

Rincian Aset Lancar tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 19
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)		1.206.554
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	25.448.482	0
Persediaan	253.445.670	333.839.250
Jumlah Aset Lancar	278.894.152	335.045.804

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp0.00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Rekening Bank	0	0
Panjar Kerja	0	0
Saldo LS Bendahara	0	0
Saldo Pajak yang belum disetorkan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0.00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0.00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari pengelolaan UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.3 Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar
di Muka
Rp0.00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.206.554,00.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum

diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (Tunjangan Fungsional PNS)	-0	0
Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (uang makan PNS)	0	492.100
Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (Tunjangan Kinerja PNS)	0	714.454
Jumlah	0	1.206.554

C.1.4 Persediaan

Persediaan

Rp253.445.670,00

Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp253.445.670,00 dan Rp333.839.250,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Barang Konsumsi	240.717.805	310.180.850
Bahan untuk Pemeliharaan	12.727.865	23.658.400
Jumlah	253.445.670	333.839.250

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0.00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Tabel 23
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah	0	0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0.00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara, sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar
TPA
Rp0.00

C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0.00

C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp25.448.482,00

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp25.448.482,00 dan Rp0.00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Tabel 24
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Diterima (Tunjangan Kinerja PNS)	268.731	0
Belanja Pegawai yang Masih Harus Diterima (Uang Makan PNS)	3.791.400	0
Belanja Pegawai yang Masih Harus Diterima (Tunjangan Kinerja PPPK)	4.555.101	0
Belanja Pegawai yang Masih Harus Diterima (Uang Makan PPPK)	16.833.250	0
Jumlah	25.448.482	0

C.2 Aset Tetap

**Aset Tetap
(neto)**
Rp1.214.289.899,00

Saldo Aset Tetap netto per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.214.289.899,00 dan Rp1.950.730.871,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah seperti pada tabel berikut:

*Tabel 25
Perbandingan Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Peralatan dan Mesin	20.802.728.712	20.966.728.712
Aset Tetap Lainnya	140.926.055	140.926.055
Akumulasi Penyusutan	-19.729.364.868	-19.156.923.896
Jumlah Aset Lancar	1.214.289.899	1.950.730.871

C.2.1 Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan
Mesin (neto)**
Rp20.802.728.712,00

Saldo nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah Rp20.802.728.712,00 dan Rp20.966.728.712,00. Adapun rincian saldo dan rincian nilai buku peralatan dan mesin adalah sebagai berikut

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 26
Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025*

(dalam Rupiah)

Saldo Per 1 Januari 2025	20.966.728.712
Mutasi Tambah	
- Pembelian	0
- Transfer Masuk	0

- Koreksi Pencatatan	0
- Hibah Barang	0
- Perolehan lainnya	0
- Mutasi tambah perolehan lainnya	0
- Reklasifikasi Masuk	0
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Jumlah Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
- Koreksi Pencatatan	0
- Reklasifikasi Keluar	0
- Transfer Keluar	0
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	(164.000.000)
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0
- Usulan Penghapusan ke Pengelola	0
- Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Saldo Per 31 Desember 2025	20.802.728.712
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2025	-19.729.364.868
Nilai Buku Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	1.073.363.844

C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp19.729.364.868,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar (Rp19.729.364.868,00) dan (Rp19.156.923.896,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-19.729.364.868
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Jumlah	-19.729.364.868

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp0.00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0.00*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0.00*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

C.2.6 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp140.926.055,00*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar

Rp140.926.055,00 dan Rp140.926.055,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan. Adapun Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku-buku perpustakaan.

C.3 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
(neto)
Rp20.791.271,00*

Saldo Aset Lainnya (nilai buku) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp20.791.271,00 dan Rp87.307.189,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya per 31 Desember 2025 merupakan aset tak berwujud.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

*Tabel 28
Perbandingan Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Aset Tak Berwujud	1.779.596.280	1.779.596.280
Aset Lain-Lain	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-1.758.805.009	-1.692.289.091
Jumlah Aset Lainnya	20.791.271	87.307.189

C.3.1 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud (neto)
Rp54.049.230,00*

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) berdasarkan nilai buku (netto) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *(Audited)* adalah masing-masing sebesar Rp20.791.271,00 dan Rp87.307.189,00. Per tanggal pelaporan, terdapat pembelian aset tak berwujud berupa pengembangan aplikasi SMILED senilai Rp115.884.000,00. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Software Komputer	1.895.480.280
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tak Berwujud	-1.874.689.009
Jumlah	20.791.271

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud disajikan berikut ini :

Tabel 30
Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Saldo Per 1 Januari 2025	1.779.596.280
Mutasi Tambah	
- Pembelian	115.884.000
- Pengembangan nilai	0
- Penghentian penggunaan aset tak berwujud	0
- Koreksi pencatatan	0
Jumlah Mutasi Tambah	115.884.000
Mutasi Kurang	
- Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Saldo Per 31 Desember 2025	1.895.480.280
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Tak Berwujud s/d 31 Desember 2025	-1.874.689.009
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	20.791.271

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.038.689.009,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing masing sebesar (Rp2.038.689.009,00) dan (Rp1.692.289.091,00), merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap/aset tak berwujud lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	1.895.480.280	-1.874.689.009	Rp 20.791.271
Jumlah	1.895.480.280	-1.874.689.009	Rp 20.791.271

C.3.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp164.000.000,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Komisi Penyiaran Indonesia.

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp164.000.000,00 dan Rp0,00.

C.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap yang
Tidak Digunakan
dalam Operasi
Pemerintah
(Rp164.000.000,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing masing sebesar (Rp164.000.000,00) dan (Rp0,00) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah.

**Kewajiban
Jangka Pendek**
Rp3.612.180,00

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah pengklasifikasian kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp3.612.180 dan Rp0,00.

Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek tersebut sebagaimana tabel:

*Tabel 32
Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Utang kepada Pihak Ketiga	3.612.180	0
Jumlah	3.612.180	0

**Utang kepada
Pihak Ketiga**
Rp3.612.180,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp3.612.180,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Belanja barang yang masih harus dibayar (Tagihan Telepon dan Air bulan Desember 2025)	3.612.180	0
Jumlah	3.612.180	0

Belanja barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp 3.612.180,00 atas tagihan telepon dan air atas pemakaian pada bulan Desember 2025 yang tagihannya baru muncul di bulan Januari 2026.

C.4.2 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Utang yang Belum Diterima Tagihannya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *(Audited)* adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Total Nilai SPBy tervalidasi yang belum diajukan SPP/SPM	0	0
Jumlah	0	0

*Utang yang
 Belum Diterima
 Tagihannya
 Rp0.00*

Uang Muka dari
KPPN
Rp0.00

C.4.3 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Jumlah Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Dana TUP dan/atau GUP yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
Jumlah	300.000.000	0

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0.00

C.4.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
Jumlah	0	0

C.5 Ekuitas

Ekuitas

Rp1.510.363.142,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp1.510.363.142,00 dan Rp2.373.083.864.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

D.1 Pendapatan

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan

Rp0.00

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai (netto)

Rp16.595.626.518,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp16.595.626.518,00 dan Rp7.351.331.186,00.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.006.383.564	1.918.109.577	4,60
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.393.673.294,00	1.369.202.100	1,79
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.651	22.218	-7,05
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	77.210.810	68.222.080	13,18
511122	Beban Tunj. Anak PNS	14.828.776	13.472.284	10,07
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	45.500.000	45.500.000	0,00
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	134.089.000	107.058.000	25,25
511125	Beban Tunj. PPh PNS	13.674.213	12.959.315	5,52
511126	Beban Tunj. Beras PNS	60.905.220	57.863.580	5,26
511129	Beban Uang Makan PNS	227.261.600	192.805.000	17,87
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	39.220.000	51.005.000	-23,11
5116	Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	4.989.086.866	50.654.986	9.749,15
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.462.449.595	38.443.200	8906,66
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	54.763	746	7240,88
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	251.468.539	0	0,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	66.597.134	0	0,00

511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	5.940.000	27,27
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	212.474.245	869.040	24349,31
511628	Belanja Uang Makan PPPK	789.689.750	5.402.000	14518,47
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	198.792.840	0	0,00
5121	Belanja Honorarium	2.899.888.000	2.899.888.000	0,00
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2.899.888.000	2.899.888.000	0,00
5122	Belanja Lembur	142.522.000	133.726.000	6,58
512211	Belanja Uang Lembur	94.350.000	133.726.000	-29,45
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	48.172.000	0	0,00
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	6.557.746.088	2.350.900.423	178,95
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.385.431.941	2.301.019.579	3,67
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4.172.314.147	49.880.844	8264,56
Realisasi Belanja (neto)		16.595.626.518	7.353.278.986	125,69

Terdapat kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan PPPK yang signifikan sehubungan dengan pengangkatan pegawai ke jabatan PPPK pada bulan Mei 2025.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp 365.912.297,00 dan Rp863.957.619,00.

*Beban
Persediaan
Rp365.912.297,00*

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Persediaan konsumsi	365.912.297	863.957.619
Jumlah	365.912.297	863.957.619

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp21.667.593.068,00

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp21.667.593.068,00 dan Rp29.946.264.047,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Keperluan Perkantoran	2.680.950.708	5.224.353.167
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	91.413.868	40.715.260
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111.480.000	98.904.000
Beban Barang Operasional Lainnya	220.826.481	396.668.373
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
Beban Bahan	791.234.330	1.607.744.943
Beban Honor Output Kegiatan	6.546.410.780	12.083.234.846
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.309.579.500	1.829.371.988

Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
Beban Langganan Listrik	669.867.689	751.920.385
Beban Langganan Telepon	17.761.350	16.638.711
Beban Langganan Air	21.449.020	20.979.944
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	662.176.719	483.375.235
Beban Jasa Konsultan	0	123.235.000
Beban Sewa	2.869.780.000	3.132.483.832
Beban Jasa Profesi	2.512.900.000	3.185.500.000
Beban Jasa Lainnya	3.161.762.623	951.138.363
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
Jumlah	21.667.593.068	29.946.264.047

D.5 Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan
Rp865.588.511,00**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp865.588.511,00 dan Rp1.753.925.730,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 40
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224,377,121	640.683.907
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	529,408,745	1.000.007.373
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	111,802,645	113.234.450
Jumlah	865.588.511	1.753.925.730

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan Dinas**
Rp2.185.407.016,00

Beban perjalanan dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp2.185.407.016,00 dan Rp15.901.040.525,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 41
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.568.933.636	7.873.188.525
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97.265.000	300.308.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	5.988.146.133
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	519.208.380	1.739.397.867
Jumlah	2.185.407.016	15.901.040.525

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

**Beban Barang
Untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat**
Rp0

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Tabel 42
Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0
Jumlah	0	0

Beban Bunga*Rp0.00***D.8 Beban Bunga**

Jumlah Beban Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Subsidi*Rp0.00***D.9 Beban Subsidi**

Jumlah Beban Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Hibah*Rp0.00***D.10 Beban Hibah**

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Bantuan*Sosial**Rp0.00***D.11 Beban Bantuan Sosial**

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban**Penyusutan dan****Amortisasi***Rp918.840.890,00***D.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp918.840.890,00 dan Rp1.478.210.648,00. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	736,440,972	1.375.141.380
Beban Amortisasi Software	182,399,918	93.328.418
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	9.740.850
Jumlah	918.840.890	1.478.210.648

D.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.14 Beban Transfer

Beban Transfer
Rp0,00

Jumlah Beban Transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.15 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain
Rp0,00

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.16 Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp47.750.000,00

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)

adalah sebesar Rp47.750.000,00 dan Rp42.229.238,00. Adapun nilai pada TA 2025 sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 44

*Perbandingan Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited)*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa lelang Peralatan dan Mesin (425122)	47.750.000	
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit (425122)		52.000.000
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa lelang barang bergerak berupa parabola sebanyak 1 (satu) unit (425122)		125.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar (596111)		-9.895.762
Jumlah	47.750.000	42.229.238

D.17 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa

Rp0,00

Beban Luar Biasa

Pos-pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

Jumlah beban dari pos luar biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus/Defisit-LO D.18 Surplus/ Defisit – LO

(Rp42.551.218.300,00) Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos-pos luar biasa.

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) masing-masing adalah sebesar (Rp42.551.218.300,00) dan (Rp57.252.500.517,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp2.373.083.864,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.373.083.864,00 dan Rp2.890.804.072,00.

E.2 Surplus/ Defisit – LO

Surplus/ Defisit - LO
(Rp42.551.218.300,00)

Jumlah Surplus/ Defisit – LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah defisit sebesar (Rp42.551.218.300,00) dan (Rp57.252.500.517,00).

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
Rp0,00

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,00*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Selisih Revaluasi
Aset
Rp0,00*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang terhadap aset tetap.

Jumlah Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0,00*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Lain-lain
Rp0,00*

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar
Entitas*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal

Rp41.688.497.578,00 Kementerian/Lembaga (K/L), antar K/L, antar Bendahara Umum Negara (BUN) maupun K/L dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp 41.688.497.578,00 dan Rp56.734.780.309,00. Adapun rincian Transaksi antar Entitas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45

*Rincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025*

Keterangan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	41.737.454.132,00	Transaksi pengelolaan dan pertanggungjawaban kas dengan KPPN (UP, TUP, LS), penerimaan hasil lelang, dan pengembalian TAYL
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(48.956.554,00)	Realisasi PNBPN 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 sebagaimana Tabel 7
Total	41.688.497.578,00	

Ekuitas Akhir

Rp1.510.363.142,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (Audited) adalah sebesar Rp1.510.363.142,00 dan Rp2.373.083.864,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Beberapa kejadian penting setelah tanggal neraca antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyisihan belanja pegawai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp4.060.131,00 yang merupakan total pengembalian uang makan (senilai Rp3.791.400,00) dan tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2025 (senilai Rp268.731,00) telah dilakukan penyetoran/pengembalian ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2026 dengan nomor NTPN 799CD1JNG80HCEP8 dan 9E8A161QVCSFCTEC.

F.2 Rekening Pemerintah

Rekening Bendahara Pengeluaran Komisi Penyiaran Indonesia per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 Desember 2025
8100126643231000	BPG 059 Komisi Penyiaran Indonesia	0

Kepala Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Umri



Lampiran Data LK dari Aplikasi SAKTI dan/atau MONSAKTI



Surat Hasil Rekomendasi (SHR)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 664323 - KOMISI PENYIARAN INDONESIA
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 19/02/26 8:55

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	52,662,290,000	52,662,290,000	0
2	Belanja	41,739,520,733	41,739,520,733	0
3	Pengembalian Belanja	-2,066,601	-2,066,601	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	48,956,554	48,956,554	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026





Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,595,626,518	7,351,331,186	9,244,295,332	125.75
Beban Persediaan	365,912,297	863,957,619	(498,045,322)	(57.647)
Beban Barang dan Jasa	21,667,593,068	29,946,264,047	(8,278,670,979)	(27.645)
Beban Pemeliharaan	865,588,511	1,753,925,730	(888,337,219)	(50.649)
Beban Perjalanan Dinas	2,185,407,016	15,901,040,525	(13,715,633,509)	(86.256)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	918,840,890	1,478,210,648	(559,369,758)	(37.841)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	42,598,968,300	57,294,729,755	(14,695,761,455)	(25.649)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,598,968,300)	(57,294,729,755)	14,695,761,455	(25.649)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	47,750,000	42,229,238	5,520,762	13.073
Pendapatan Pelepasan Aset	47,750,000	52,125,000	(4,375,000)	(8.393)
Beban Pelepasan Aset	0	9,895,762	(9,895,762)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	47,750,000	42,229,238	5,520,762	13.073
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(42,551,218,300)	(57,252,500,517)	14,701,282,217	(25.678)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(42,551,218,300)	(57,252,500,517)	14,701,282,217	(25.678)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



UMRI, S. SOS., M.SI
NIP. 197007271994031007



Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,373,083,864	2,890,804,072	(517,720,208)	(17.91)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42,551,218,300)	(57,252,500,517)	14,701,282,217	(25.68)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	41,688,497,578	56,734,780,309	(15,046,282,731)	(26.52)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(862,720,722)	(517,720,208)	(345,000,514)	66.64
EKUITAS AKHIR	1,510,363,142	2,373,083,864	(862,720,722)	(36.35)

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



UMRI, S. SOS., M.SI
NIP. 197007271994031007



Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 059
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA 664323

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	48,956,554	48,956,554	0	0	53,915,083	(53,915,083)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	48,956,554	48,956,554	0	0	53,915,083	(53,915,083)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	48,956,554	48,956,554	0	0	53,915,083	(53,915,083)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	52,662,290,000	41,737,454,132	(10,924,835,868)	79	60,686,122,000	56,788,695,392	3,897,426,608	94
1. Belanja Pegawai	17,604,749,000	16,621,075,000	(983,674,000)	94	7,356,738,000	7,352,537,740	4,200,260	100
2. Belanja Barang	34,937,541,000	25,000,495,132	(9,937,045,868)	72	52,400,179,000	48,520,406,252	3,879,772,748	93
3. Belanja Modal	120,000,000	115,884,000	(4,116,000)	97	929,205,000	915,751,400	13,453,600	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 059
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KOMISI PENYIARAN INDONESIA 664323

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	52,662,290,000	41,737,454,132	(10,924,835,868)	79	60,686,122,000	56,788,695,392	3,897,426,608	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



UMRI, S. SOS., M.SI
NIP. 197007271994031007



Neraca

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,206,554	(1,206,554)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	25,448,482	0	25,448,482	0.00
Persediaan	253,445,670	333,839,250	(80,393,580)	(24.08)
JUMLAH ASET LANCAR	278,894,152	335,045,804	(56,151,652)	(16.76)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	20,802,728,712	20,966,728,712	(164,000,000)	(0.78)
Aset Tetap Lainnya	140,926,055	140,926,055	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(19,729,364,868)	(19,156,923,896)	(572,440,972)	2.99
JUMLAH ASET TETAP	1,214,289,899	1,950,730,871	(736,440,972)	(37.75)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,895,480,280	1,779,596,280	115,884,000	6.51
Aset Lain-lain	164,000,000	0	164,000,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,038,689,009)	(1,692,289,091)	(346,399,918)	20.47
JUMLAH ASET LAINNYA	20,791,271	87,307,189	(66,515,918)	(76.19)
JUMLAH ASET	1,513,975,322	2,373,083,864	(859,108,542)	(36.20)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,612,180	0	3,612,180	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,612,180	0	3,612,180	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,612,180	0	3,612,180	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,510,363,142	2,373,083,864	(862,720,722)	(36.35)
JUMLAH EKUITAS	1,510,363,142	2,373,083,864	(862,720,722)	(36.35)
JUMLAH EKUITAS	1,510,363,142	2,373,083,864	(862,720,722)	(36.35)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,513,975,322	2,373,083,864	(859,108,542)	(36.20)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran





Neraca Percobaan Akrua

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	25,448,482	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	240,717,805	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12,727,865	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	20,802,728,712	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	140,926,055	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,729,364,868
0.0	162151	Software	1,895,480,280	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	164,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	164,000,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,874,689,009
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,612,180
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	41,737,454,132
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	48,956,554	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,373,083,864
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	47,750,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,393,673,294	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,651	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	77,210,810	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,828,776	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	45,500,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	134,089,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,674,213	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	60,905,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	227,261,600	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	39,220,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3,462,449,595	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	54,763	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	251,468,539	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	66,597,134	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	212,474,245	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	789,689,750	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	198,792,840	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	2,899,888,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	94,350,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	48,172,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,385,431,941	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,172,314,147	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:22 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,680,950,708	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	91,413,868	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	220,826,481	0
3.0	521211	Beban Bahan	791,234,330	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,546,410,780	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,309,579,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	669,867,689	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,761,350	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	21,449,020	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	662,176,719	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,869,780,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,512,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,161,762,623	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224,377,121	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	529,408,745	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,568,933,636	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97,265,000	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	519,208,380	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	736,440,972	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	182,399,918	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	365,912,297	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	111,802,645	0
JUMLAH			65,929,954,053	65,929,954,053

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



UMRI, S. SOS., M.SI

NIP. 197007271994031007



Neraca Percobaan Kas

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:23 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	41,737,454,132
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	48,956,554	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	47,750,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,206,554
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,393,673,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,746	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	77,210,810	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,828,776	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,500,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	134,860,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13,674,213	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60,905,220	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	231,053,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,515,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,462,449,595	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	54,763	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	251,468,539	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	66,597,134	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	212,474,245	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	806,523,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	198,792,840	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,899,888,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	94,350,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	48,172,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,385,700,672	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4,176,869,248	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,680,950,708	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	91,413,868	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	220,826,481	0
3.0	521211	Belanja Bahan	791,234,330	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,546,410,780	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,309,579,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	397,321,362	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	669,867,689	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	16,349,854	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	19,248,336	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (059) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (664323) KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 01/05/26 2:23 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	662,176,719	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,869,780,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,512,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,161,762,623	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224,377,121	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	529,408,745	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,568,933,636	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	97,265,000	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	519,208,380	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	115,884,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	506
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	95
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	771,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,295,000
JUMLAH			41,788,477,287	41,788,477,287

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 1 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



UMRI, S. SOS., M.SI

197007271994031007



LRA Belanja Menurut Akun

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 664323 **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,517,098,000	1,410,653,000	1,393,673,800	506	1,393,673,294	98.8	16,979,706
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,184,000	26,000	20,746	95	20,651	79.43	5,349
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88,738,000	78,065,000	77,210,810	0	77,210,810	98.91	854,190
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,391,000	15,690,000	14,828,776	0	14,828,776	94.51	861,224
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,500,000	45,500,000	45,500,000	0	45,500,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,544,000	148,596,000	134,860,000	771,000	134,089,000	90.24	14,507,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,614,000	41,000,000	13,674,213	0	13,674,213	33.35	27,325,787
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46,460,000	61,750,000	60,905,220	0	60,905,220	98.63	844,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	402,688,000	296,565,000	231,053,000	0	231,053,000	77.91	65,512,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	62,005,000	41,400,000	40,515,000	1,295,000	39,220,000	94.73	2,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,290,222,000	2,139,245,000	2,012,241,565	2,066,601	2,010,174,964	93.97	129,070,036
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,242,000	3,512,576,000	3,462,449,595	0	3,462,449,595	98.57	50,126,405
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	145,000	54,763	0	54,763	37.77	90,237
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	315,841,000	251,468,539	0	251,468,539	79.62	64,372,461
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	94,866,000	66,597,134	0	66,597,134	70.2	28,268,866
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,240,000	9,180,000	7,560,000	0	7,560,000	82.35	1,620,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,000	241,355,000	212,474,245	0	212,474,245	88.03	28,880,755
511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,030,000	899,649,000	806,523,000	0	806,523,000	89.65	93,126,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	220,565,000	198,792,840	0	198,792,840	90.13	21,772,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	46,397,000	5,294,177,000	5,005,920,116	0	5,005,920,116	94.56	288,256,884
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,834,160,000	2,937,326,000	2,899,888,000	0	2,899,888,000	98.73	37,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	2,834,160,000	2,937,326,000	2,899,888,000	0	2,899,888,000	98.73	37,438,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	20,256,000	113,760,000	94,350,000	0	94,350,000	82.94	19,410,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,216,000	80,400,000	48,172,000	0	48,172,000	59.92	32,228,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	23,472,000	194,160,000	142,522,000	0	142,522,000	73.4	51,638,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,748,240,000	2,592,873,000	2,385,700,672	0	2,385,700,672	92.01	207,172,328
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,547,000	4,446,968,000	4,176,869,248	0	4,176,869,248	93.93	270,098,752
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,798,787,000	7,039,841,000	6,562,569,920	0	6,562,569,920	93.22	477,271,080

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 664323
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:25 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,993,038,000	17,604,749,000	16,623,141,601	2,066,601	16,621,075,000	94.41	983,674,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,896,243,000	2,805,284,000	2,680,950,708	0	2,680,950,708	95.57	124,333,292
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	96,340,000	146,278,000	91,413,868	0	91,413,868	62.49	54,864,132
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	180,240,000	192,616,000	111,480,000	0	111,480,000	57.88	81,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,550,498,000	1,690,000,000	220,826,481	0	220,826,481	13.07	1,469,173,519
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,723,321,000	4,834,178,000	3,104,671,057	0	3,104,671,057	64.22	1,729,506,943
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	905,235,000	939,837,000	791,234,330	0	791,234,330	84.19	148,602,670
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,155,349,000	7,142,154,000	6,546,410,780	0	6,546,410,780	91.66	595,743,220
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,435,165,000	1,427,706,000	1,309,579,500	0	1,309,579,500	91.73	118,126,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,495,749,000	9,509,697,000	8,647,224,610	0	8,647,224,610	90.93	862,472,390
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,251,056,000	1,411,134,000	397,321,362	0	397,321,362	28.16	1,013,812,638
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,251,056,000	1,411,134,000	397,321,362	0	397,321,362	28.16	1,013,812,638
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	700,000,000	700,000,000	669,867,689	0	669,867,689	95.7	30,132,311
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	21,000,000	16,349,854	0	16,349,854	77.86	4,650,146
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	27,000,000	19,248,336	0	19,248,336	71.29	7,751,664
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	775,800,000	682,800,000	662,176,719	0	662,176,719	96.98	20,623,281
522131	Belanja Jasa Konsultan	634,828,000	610,828,000	0	0	0	0	610,828,000
522141	Belanja Sewa	3,371,586,000	3,195,324,000	2,869,780,000	0	2,869,780,000	89.81	325,544,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,157,300,000	2,682,422,000	2,512,900,000	0	2,512,900,000	93.68	169,522,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,224,868,000	3,534,578,000	3,161,762,623	0	3,161,762,623	89.45	372,815,377
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,942,382,000	11,453,952,000	9,912,085,221	0	9,912,085,221	86.54	1,541,866,779
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	406,652,000	643,752,000	224,377,121	0	224,377,121	34.85	419,374,879
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,360,340,000	1,472,974,000	529,408,745	0	529,408,745	35.94	943,565,255
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,766,992,000	2,116,726,000	753,785,866	0	753,785,866	35.61	1,362,940,134
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,996,498,000	2,540,744,000	1,568,933,636	0	1,568,933,636	61.75	971,810,364
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153,369,000	97,265,000	97,265,000	0	97,265,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,840,114,000	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 664323
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:25 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,990,281,000	2,638,009,000	1,666,198,636	0	1,666,198,636	63.16	971,810,364
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,033,945,000	2,973,845,000	519,208,380	0	519,208,380	17.46	2,454,636,620
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,033,945,000	2,973,845,000	519,208,380	0	519,208,380	17.46	2,454,636,620
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	49,203,726,000	34,937,541,000	25,000,495,132	0	25,000,495,132	71.56	9,937,045,868
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520,225,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	520,225,000	0	0	0	0		0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	120,000,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	120,000,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	640,225,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH BELANJA	56,836,989,000	52,662,290,000	41,739,520,733	2,066,601	41,737,454,132	79.25	10,924,835,868



LRA Pendapatan Menurut Akun

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 664323 **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 01/05/26 2:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	47,750,000	0	47,750,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	47,750,000	0	47,750,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,206,554	0	1,206,554	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,206,554	0	1,206,554	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	48,956,554	0	48,956,554	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	48,956,554	0	48,956,554	



Laporan Realisasi Anggaran Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 664323 **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,517,098,000	1,410,653,000	1,393,673,800	506	1,393,673,294	98.8	16,979,706
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,184,000	26,000	20,746	95	20,651	79.43	5,349
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88,738,000	78,065,000	77,210,810	0	77,210,810	98.91	854,190
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,391,000	15,690,000	14,828,776	0	14,828,776	94.51	861,224
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,500,000	45,500,000	45,500,000	0	45,500,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,544,000	148,596,000	134,860,000	771,000	134,089,000	90.24	14,507,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,614,000	41,000,000	13,674,213	0	13,674,213	33.35	27,325,787
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46,460,000	61,750,000	60,905,220	0	60,905,220	98.63	844,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	402,688,000	296,565,000	231,053,000	0	231,053,000	77.91	65,512,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	62,005,000	41,400,000	40,515,000	1,295,000	39,220,000	94.73	2,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,290,222,000	2,139,245,000	2,012,241,565	2,066,601	2,010,174,964	93.97	129,070,036
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,242,000	3,512,576,000	3,462,449,595	0	3,462,449,595	98.57	50,126,405
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	145,000	54,763	0	54,763	37.77	90,237
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	315,841,000	251,468,539	0	251,468,539	79.62	64,372,461
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	94,866,000	66,597,134	0	66,597,134	70.2	28,268,866
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3,240,000	9,180,000	7,560,000	0	7,560,000	82.35	1,620,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,000	241,355,000	212,474,245	0	212,474,245	88.03	28,880,755
511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,030,000	899,649,000	806,523,000	0	806,523,000	89.65	93,126,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	220,565,000	198,792,840	0	198,792,840	90.13	21,772,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	46,397,000	5,294,177,000	5,005,920,116	0	5,005,920,116	94.56	288,256,884
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,834,160,000	2,937,326,000	2,899,888,000	0	2,899,888,000	98.73	37,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	2,834,160,000	2,937,326,000	2,899,888,000	0	2,899,888,000	98.73	37,438,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	20,256,000	113,760,000	94,350,000	0	94,350,000	82.94	19,410,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	3,216,000	80,400,000	48,172,000	0	48,172,000	59.92	32,228,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	23,472,000	194,160,000	142,522,000	0	142,522,000	73.4	51,638,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,748,240,000	2,592,873,000	2,385,700,672	0	2,385,700,672	92.01	207,172,328
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,547,000	4,446,968,000	4,176,869,248	0	4,176,869,248	93.93	270,098,752
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,798,787,000	7,039,841,000	6,562,569,920	0	6,562,569,920	93.22	477,271,080

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 664323
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,993,038,000	17,604,749,000	16,623,141,601	2,066,601	16,621,075,000	94.41	983,674,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,896,243,000	2,805,284,000	2,680,950,708	0	2,680,950,708	95.57	124,333,292
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	96,340,000	146,278,000	91,413,868	0	91,413,868	62.49	54,864,132
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	180,240,000	192,616,000	111,480,000	0	111,480,000	57.88	81,136,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,550,498,000	1,690,000,000	220,826,481	0	220,826,481	13.07	1,469,173,519
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,723,321,000	4,834,178,000	3,104,671,057	0	3,104,671,057	64.22	1,729,506,943
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	905,235,000	939,837,000	791,234,330	0	791,234,330	84.19	148,602,670
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,155,349,000	7,142,154,000	6,546,410,780	0	6,546,410,780	91.66	595,743,220
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,435,165,000	1,427,706,000	1,309,579,500	0	1,309,579,500	91.73	118,126,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,495,749,000	9,509,697,000	8,647,224,610	0	8,647,224,610	90.93	862,472,390
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,251,056,000	1,411,134,000	397,321,362	0	397,321,362	28.16	1,013,812,638
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,251,056,000	1,411,134,000	397,321,362	0	397,321,362	28.16	1,013,812,638
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	700,000,000	700,000,000	669,867,689	0	669,867,689	95.7	30,132,311
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	21,000,000	16,349,854	0	16,349,854	77.86	4,650,146
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	27,000,000	19,248,336	0	19,248,336	71.29	7,751,664
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	775,800,000	682,800,000	662,176,719	0	662,176,719	96.98	20,623,281
522131	Belanja Jasa Konsultan	634,828,000	610,828,000	0	0	0	0	610,828,000
522141	Belanja Sewa	3,371,586,000	3,195,324,000	2,869,780,000	0	2,869,780,000	89.81	325,544,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,157,300,000	2,682,422,000	2,512,900,000	0	2,512,900,000	93.68	169,522,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,224,868,000	3,534,578,000	3,161,762,623	0	3,161,762,623	89.45	372,815,377
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,942,382,000	11,453,952,000	9,912,085,221	0	9,912,085,221	86.54	1,541,866,779
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	406,652,000	643,752,000	224,377,121	0	224,377,121	34.85	419,374,879
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,360,340,000	1,472,974,000	529,408,745	0	529,408,745	35.94	943,565,255
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,766,992,000	2,116,726,000	753,785,866	0	753,785,866	35.61	1,362,940,134
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,996,498,000	2,540,744,000	1,568,933,636	0	1,568,933,636	61.75	971,810,364
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153,369,000	97,265,000	97,265,000	0	97,265,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,840,114,000	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 664323
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/05/26 2:31 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 1/5/26 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,990,281,000	2,638,009,000	1,666,198,636	0	1,666,198,636	63.16	971,810,364
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,033,945,000	2,973,845,000	519,208,380	0	519,208,380	17.46	2,454,636,620
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,033,945,000	2,973,845,000	519,208,380	0	519,208,380	17.46	2,454,636,620
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	49,203,726,000	34,937,541,000	25,000,495,132	0	25,000,495,132	71.56	9,937,045,868
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520,225,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	520,225,000	0	0	0	0		0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	120,000,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	120,000,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	640,225,000	120,000,000	115,884,000	0	115,884,000	96.57	4,116,000
	JUMLAH BELANJA	56,836,989,000	52,662,290,000	41,739,520,733	2,066,601	41,737,454,132	79.25	10,924,835,868



Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 664323

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

SEKRETARIAT JENDERAL

DKI JAKARTA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl. Cetak 01/05/2026 2:33 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1,206,554	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	310,180,850	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	23,658,400	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	20,966,728,712	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	140,926,055	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,156,923,896
0.0	162151	Software	1,779,596,280	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,692,289,091
0.0	391111	Ekuitas	0	2,373,083,864
JUMLAH			23,222,296,851	23,222,296,851



Kertas Kerja Telaah, Jurnal Penyesuaian, dan Memo Penyesuaian

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (664323) Komisi Penyiaran Indonesia

Kode dan Nama UAPPAW : -

Kode dan Nama Eselon 1 : (664241) Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital

Kode dan Nama K/L : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya		
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		✓	Tidak
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Note: bukan satuan kerja BLU			
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akreal?		√	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		√	Ya/Tidak

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya
	Saldo ekuitas bernilai minus, dikarenakan terdapat dana UP yang belum dipertanggungjawabkan dan penambahan signifikan belanja pegawai yang masih harus dibayar			
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
	Nilai perolehan aset bertambah, namun nilai buku aset menurun sejalan dengan akumulasi penyusutan			
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Tidak
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
Pagu minus berasal dari realisasi belanja pegawai (belanja tunjangan PNS)				
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akreal?	✓		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	✓		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akreal pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akreal		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akreal		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akreal		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akreal	✓		Ya/Tidak
	Note: belanja listrik, telepon, dan internet semuanya diabayakan di bulan Desember 2024			
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akreal	✓		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akreal BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akreal BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>				

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL / Penanggung Jawab UAKPA



Umri

Jakarta, 1 Mei 2026
Penelaah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisa' followed by a stylized surname.

(Elisa Lailatul Adawiyah)
NIP. 199912272022012001

JURNAL MANUAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2025-13

KEMENTERIAN	: 059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL		
ESELON 1	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL		
WILAYAH/PROPINSI	: 0199	Kantor Pusat		
SATUAN KERJA	: 664323	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	Tanggal	: 19-02-2026
JENIS KEWENANGAN	: KP	Kantor Pusat	Halaman	: 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	202512664323008	Jurnal balik sehubungan dengan koreksi penyisihan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	664323.018.114111.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	114111	AKRUAL	0	25,448,482	Belum
31-12-2025	202512664323008	Jurnal balik sehubungan dengan koreksi penyisihan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	664323.018.114311.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	114311	AKRUAL	25,448,482	0	Belum
31-12-2025	202512664323007	Jurnal balik koreksi akun	664323.018.212111.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	212111	AKRUAL	25,448,482	0	Belum
31-12-2025	202512664323007	Jurnal balik koreksi akun	664323.018.114311.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	114311	AKRUAL	0	25,448,482	Belum
31-12-2025	202512664323007	Reklasifikasi jurnal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar menjadi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sehubungan dengan PMK 100/2025	664323.018.212111.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	212111	AKRUAL	0	25,448,482	Belum
31-12-2025	202512664323007	Reklasifikasi jurnal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar menjadi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sehubungan dengan PMK 100/2025	664323.018.114311.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	114311	AKRUAL	25,448,482	0	Belum
31-12-2025	202512664323006	Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan PAM bulan Desember 2025	664323.018.212112.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	212112	AKRUAL	0	2,200,684	Belum
31-12-2025	202512664323006	Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan PAM bulan Desember 2025	664323.018.522113.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	522113	AKRUAL	2,200,684	0	Belum
31-12-2025	202512664323005	Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan telepon bulan Desember 2025	664323.018.212112.0590100.0000000.0000000000.000000.1.0151.2.000000.000000	212112	AKRUAL	0	1,411,496	Belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2025-13

KEMENTERIAN
ESELON 1
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
JENIS KEWENANGAN

: 059
: 01
: 0199
: 664323
: KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIAT JENDERAL
Kantor Pusat
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Kantor Pusat

Tanggal : 19-02-2026
Halaman : 2

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
31-12-2025	202512664323005		664323.018.212112.0590100.0000000. 0000000000.000000.1.0151.2.000000.0 00000	212112	AKRUAL	0	1,411,496	Belum
31-12-2025	202512664323005	Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan telepon bulan Desember 2025	664323.018.522112.0590100.0000000. 0000000000.000000.1.0151.2.000000.0 00000	522112	AKRUAL	1,411,496	0	Belum
						79,957,626	79,957,626	

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital
Eselon I : (05901) Sekretariat Jenderal
Wilayah : (059010199) Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : (664323) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
No. Dokumen : 202512664323005
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan telepon bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1.	☐	Pendapatan Diterima Di Muka	17.	☐	Transfer Masuk
2.	☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18.	☐	Transfer Keluar
3.	☐	Belanja Dibayar Di Muka	19.	☐	Koreksi Beban Aset
4.	☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20.	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5.	☐	Penyisihan Piutang	21.	☐	Kas Lainnya di BLU
6.	☐	Penghapusan Piutang	22.	☐	Uang Muka Belanja
7.	☐	Penyusutan Aset	23.	☐	Perolehan Aset
8.	☐	Kas di Bendahara Penerimaan	24.	☐	Koreksi Piutang/Utang
9.	☐	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.	☐	Hibah Langsung
10.	☐	Persediaan	26.	☐	
11.	☐	Koreksi Antar Beban	27.	☐	
12.	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.	☐	
13.	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29.	☐	
14.	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30.	☐	Penyesuaian Neraca
15.	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31.	☐	Jurnal Koreksi
16.	☐	Pembentukan piutang Jangka Pendek	32.	☐	Jurnal Umum

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	1.411.496	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		1.411.496

Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan telepon bulan Desember 2025 senilai Rp1.411.496.00

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Disetujui Oleh:
Penanggung jawab UAKPA

Direkam Oleh:
Petugas Aplikasi

R. Irania Zahra
NIP. 198906272014032003
Tanggal: 31 Desember 2025



Umri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197007271994031007
Tanggal: 31 Desember 2025

Elisa Lailatul Adawiyah
NIP. 199912272022012001
Tanggal: 31 Desember 2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital
Eselon I : (05901) Sekretariat Jenderal
Wilayah : (059010199) Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : (664323) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
No. Dokumen : 202512664323006
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan PAM bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1.	☐	Pendapatan Diterima Di Muka	17.	☐	Transfer Masuk
2.	☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18.	☐	Transfer Keluar
3.	☐	Belanja Dibayar Di Muka	19.	☐	Koreksi Beban Aset
4.	☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20.	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5.	☐	Penyisihan Piutang	21.	☐	Kas Lainnya di BLU
6.	☐	Penghapusan Piutang	22.	☐	Uang Muka Belanja
7.	☐	Penyusutan Aset	23.	☐	Perolehan Aset
8.	☐	Kas di Bendahara Penerimaan	24.	☐	Koreksi Piutang/Utang
9.	☐	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.	☐	Hibah Langsung
10.	☐	Persediaan	26.	☐	
11.	☐	Koreksi Antar Beban	27.	☐	
12.	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.	☐	
13.	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29.	☐	
14.	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30.	☐	Penyesuaian Neraca
15.	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31.	☐	Jurnal Koreksi
16.	☐	Pembentukan piutang Jangka Pendek	32.	☐	Jurnal Umum

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	2.200.684	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		2.200.684

Keterangan:

Jurnal Penyesuaian Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan PAM bulan Desember 2025 senilai Rp2.200.684,00

Dibuat Oleh:

Petugas Verifikasi/Akuntansi



R. Irania Zahra
NIP. 198906272014032003
Tanggal: 31 Desember 2025

Disetujui Oleh:

Penanggung jawab UAKPA



Umri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197007271994031007
Tanggal: 31 Desember 2025

Direkam Oleh:

Petugas Aplikasi



Elisa Lailatul Adawiyah
NIP. 199912272022012001
Tanggal: 31 Desember 2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital
Eselon I : (05901) Sekretariat Jenderal
Wilayah : (059010199) Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : (664323) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
No. Dokumen : 202512664323007
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Reklasifikasi jurnal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar menjadi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sehubungan dengan PMK 100/2025

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1.	☐	Pendapatan Diterima Di Muka	17.	☐	Transfer Masuk
2.	☒	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18.	☐	Transfer Keluar
3.	☐	Belanja Dibayar Di Muka	19.	☐	Koreksi Beban Aset
4.	☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20.	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5.	☐	Penyisihan Piutang	21.	☐	Kas Lainnya di BLU
6.	☐	Penghapusan Piutang	22.	☐	Uang Muka Belanja
7.	☐	Penyusutan Aset	23.	☐	Perolehan Aset
8.	☐	Kas di Bendahara Penerimaan	24.	☐	Koreksi Piutang/Utang
9.	☐	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.	☐	Hibah Langsung
10.	☐	Persediaan	26.	☐	
11.	☐	Koreksi Antar Beban	27.	☐	
12.	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.	☐	
13.	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29.	☐	
14.	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30.	☐	Penyesuaian Neraca
15.	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31.	☐	Jurnal Koreksi
16.	☐	Pembentukan piutang Jangka Pendek	32.	☐	Jurnal Umum

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	25.448.482	
	K	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar		25.448.482

Keterangan:

Reklasifikasi jurnal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar menjadi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sehubungan dengan PMK 100/2025 senilai Rp25.448.482,00

Dibuat Oleh:

Petugas Verifikasi/Akuntansi



R. Irania Zahra

NIP. 198906272014032003

Tanggal: 31 Desember 2025

Disetujui Oleh:

Penanggung jawab UAKPA



Umri, S.Sos., M.Si.

NIP. 197007271994031007

Tanggal: 31 Desember 2025

Direkam Oleh:

Petugas Aplikasi



Elisa Lailatul Adawiyah

NIP. 199912272022012001

Tanggal: 31 Desember 2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital
Eselon I : (05901) Sekretariat Jenderal
Wilayah : (059010199) Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : (664323) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
No. Dokumen : 202512664323007
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal koreksi atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1.	☐	Pendapatan Diterima Di Muka	17.	☐	Transfer Masuk
2.	☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18.	☐	Transfer Keluar
3.	☐	Belanja Dibayar Di Muka	19.	☐	Koreksi Beban Aset
4.	☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20.	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5.	☐	Penyisihan Piutang	21.	☐	Kas Lainnya di BLU
6.	☐	Penghapusan Piutang	22.	☐	Uang Muka Belanja
7.	☐	Penyusutan Aset	23.	☐	Perolehan Aset
8.	☐	Kas di Bendahara Penerimaan	24.	☐	Koreksi Piutang/Utang
9.	☐	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.	☐	Hibah Langsung
10.	☐	Persediaan	26.	☐	
11.	☐	Koreksi Antar Beban	27.	☐	
12.	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.	☐	
13.	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29.	☐	
14.	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30.	☐	Penyesuaian Neraca
15.	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31.	☒	Jurnal Koreksi
16.	☐	Pembentukan piutang Jangka Pendek	32.	☐	Jurnal Umum

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	25.448.482	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		25.448.482

Keterangan:

Jurnal koreksi atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp25.448.482,00

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi

R. Irania Zahra
NIP. 198906272014032003
Tanggal: 31 Desember 2025

Disetujui Oleh:
Penanggung jawab UAKPA



Umri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197007271994031007
Tanggal: 31 Desember 2025

Direkam Oleh:
Petugas Aplikasi

Elisa Lailatul Adawiyah
NIP. 199912272022012001
Tanggal: 31 Desember 2025

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (059) Kementerian Komunikasi dan Digital
Eselon I : (05901) Sekretariat Jenderal
Wilayah : (059010199) Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : (664323) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
No. Dokumen : 202512664323008
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal balik sehubungan dengan koreksi penyisihan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

1.	☐	Pendapatan Diterima Di Muka	17.	☐	Transfer Masuk
2.	☒	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18.	☐	Transfer Keluar
3.	☐	Belanja Dibayar Di Muka	19.	☐	Koreksi Beban Aset
4.	☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20.	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5.	☐	Penyisihan Piutang	21.	☐	Kas Lainnya di BLU
6.	☐	Penghapusan Piutang	22.	☐	Uang Muka Belanja
7.	☐	Penyusutan Aset	23.	☐	Perolehan Aset
8.	☐	Kas di Bendahara Penerimaan	24.	☐	Koreksi Piutang/Utang
9.	☐	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.	☐	Hibah Langsung
10.	☐	Persediaan	26.	☐	
11.	☐	Koreksi Antar Beban	27.	☐	
12.	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28.	☐	
13.	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29.	☐	
14.	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30.	☐	Penyesuaian Neraca
15.	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31.	☐	Jurnal Koreksi
16.	☐	Pembentukan piutang Jangka Pendek	32.	☐	Jurnal Umum

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	25.448.482	
	K	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)		25.448.482

Keterangan:

Jurnal balik sehubungan dengan koreksi penyisihan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima senilai Rp25.448.482,00

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Disetujui Oleh:
Penanggung jawab UAKPA

Direkam Oleh:
Petugas Aplikasi



R. Irania Zahra
NIP. 198906272014032003
Tanggal: 31 Desember 2025

Umri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197007271994031007
Tanggal: 31 Desember 2025

Elisa Lailatul Adawiyah
NIP. 199912272022012001
Tanggal: 31 Desember 2025



Laporan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia TA 2025

Audited

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED**

Kementerian : Kementerian Komunikasi dan Digital
Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : Komisi Penyiaran Indonesia
Fungsi : Pelayanan Umum
Sub Fungsi : Pelayanan Umum Lainnya
Program : Program Dukungan Manajemen (4492) dan Komunikasi Publik (4524)
Lokasi : DKI Jakarta

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
GH	Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran								
BMB.301	Diseminasi Penyiaran	529.202.000	510.107.691	96,39	1	1,00	Kegiatan	100,00	Tercapai
QAH.701	Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan radio	266.236.000	236.284.530	88,75	1	0,00	Layanan	100,00	Tercapai
PBM.051	Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia	2.756.719.000	2.455.408.070	89,07	1	0,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tercapai
PBM.052	Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran	925.993.000	827.551.117	89,37	1	0,00	Rekomendasi Kebijakan	100,00	Tercapai
QIC.501	Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi	8.816.210.000	8.077.415.130	91,62	61	61,00	Lembaga	100,00	Tercapai
WA	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal								
EBA.994	Layanan Perkantoran	39.367.930.000	29.630.688.195	75,27	1	1,00	Layanan	100,00	Tercapai
Subtotal		52.662.290.000	41.737.454.733	79,25					
	Penyesuaian (Pengembalian belanja pegawai)	0	2.066.601	0	0	0,00		0,00	
Total		52.662.290.000	41.735.388.132	79,25					



LAPORAN BMN

TA 2025 AUDITED

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA



SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laporan Posisi BMN di Neraca Saldo Awal

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 059
UAKPB : 664323

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tanggal : 01/05/26 4:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	310,180,850
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	23,658,400
132111	Peralatan dan Mesin	20,966,728,712
135121	Aset Tetap Lainnya	140,926,055
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,156,923,896)
162151	Software	1,779,596,280
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,692,289,091)
J U M L A H		2,371,877,310

Lampiran Laporan BMN TA 2025 *Audited*

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 059 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**
UAKPB : 664323 **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

Tgl.Data : 01/05/26 12:39 PM
Tgl.Cetak : 01/05/26 4:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	240,717,805
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12,727,865
132111	Peralatan dan Mesin	20,802,728,712
135121	Aset Tetap Lainnya	140,926,055
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,729,364,868)
162151	Software	1,895,480,280
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	164,000,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(164,000,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,874,689,009)
J U M L A H		1,488,526,840

Laporan Barang Persediaan

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059
UAKPB : 664323

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tanggal : 01/05/26 4:27 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,878,200
1010301003	Penjepit Kertas	2,444,035
1010301004	Penghapus/Korektor	846,500
1010301005	Buku Tulis	764,500
1010301006	Ordner Dan Map	51,761,270
1010301007	Penggaris	432,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	302,000
1010301010	Alat Perekat	1,751,465
1010301012	Staples	396,600
1010301013	Isi Staples	7,684,000
1010301014	Barang Cetak	34,900,700
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,094,200
1010302001	Kertas HVS	4,470,530
1010302002	Berbagai Kertas	3,155,500
1010302003	Kertas Cover	2,617,430
1010302004	Amplop	22,283,000
1010302005	Kop Surat	39,520,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,104,725
1010304004	Tinta/Toner Printer	52,524,400
1010304006	USB/Flash Disk	3,628,050
1010304010	Mouse	1,170,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,260,000
1010306010	Batu Baterai	728,700
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,000,000
Jumlah Barang Konsumsi		240,717,805
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	708,580
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	2,328,250
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	210,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	338,000
1010305006	Alat Pengikat	122,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	6,190,230
1010305012	Pengharum Ruangan	2,146,305
1010305013	Kuas	132,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	552,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		12,727,865
TOTAL		253,445,670

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.

0 dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp.

4,956,500 dalam kondisi usang.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tanggal : 01/05/26 4:28 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,813	20,966,728,712	0	0	1	164,000,000	1,812	20,802,728,712
3010305	POMPA	-	1	16,767,000	0	0	0	0	1	16,767,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	1	192,500,000	0	0	0	0	1	192,500,000
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	2	445,000,000	0	0	1	164,000,000	1	281,000,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	159,600,000	0	0	0	0	6	159,600,000
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	2	3,858,400	0	0	0	0	2	3,858,400
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	-	1	5,174,000	0	0	0	0	1	5,174,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	-	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	141	864,256,430	0	0	0	0	141	864,256,430
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	73	2,565,923,204	0	0	0	0	73	2,565,923,204
3050201	MEUBELAIR	-	522	1,664,846,550	0	0	0	0	522	1,664,846,550
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	2	31,150,000	0	0	0	0	2	31,150,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	74	712,599,326	0	0	0	0	74	712,599,326
3050205	ALAT DAPUR	-	9	26,047,000	0	0	0	0	9	26,047,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	129	638,744,676	0	0	0	0	129	638,744,676
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	37	493,416,176	0	0	0	0	37	493,416,176
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	29	456,082,600	0	0	0	0	29	456,082,600
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	64	171,465,000	0	0	0	0	64	171,465,000
3060310	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	2	48,136,000	0	0	0	0	2	48,136,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	539,149,000	0	0	0	0	1	539,149,000
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	2,920,000	0	0	0	0	1	2,920,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	38	507,209,560	0	0	0	0	38	507,209,560
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	181	2,832,376,250	0	0	0	0	181	2,832,376,250
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	326	1,491,465,450	0	0	0	0	326	1,491,465,450
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	3	75,003,500	0	0	0	0	3	75,003,500
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	109	524,738,500	0	0	0	0	109	524,738,500
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	56	6,380,967,270	0	0	0	0	56	6,380,967,270
3170119	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	1	99,688,820	0	0	0	0	1	99,688,820
3190102	PERALATAN PERMAINAN	-	1	12,144,000	0	0	0	0	1	12,144,000
135121	Aset Tetap Lainnya		349	140,926,055	0	0	0	0	349	140,926,055
6010101	BUKU	-	346	139,912,055	0	0	0	0	346	139,912,055
6010301	BAHAN KARTOGRAFI	-	3	1,014,000	0	0	0	0	3	1,014,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	1	164,000,000	0	0	1	164,000,000
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	0	0	1	164,000,000	0	0	1	164,000,000
TOTAL				21,107,654,767		164,000,000		164,000,000		21,107,654,767

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 01/05/26 4:29 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		71	42,406,400	0	0	0	0	71	42,406,400
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	12	7,200,000	0	0	0	0	12	7,200,000
3050201	MEUBELAIR	-	50	28,750,000	0	0	0	0	50	28,750,000
3050205	ALAT DAPUR	-	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	7	5,226,400	0	0	0	0	7	5,226,400
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	330,000	0	0	0	0	1	330,000
TOTAL				42,406,400		0		0		42,406,400

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 01/05/26 4:29 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,884	21,009,135,112	0	0	1	164,000,000	1,883	20,845,135,112
3010305	POMPA	-	1	16,767,000	0	0	0	0	1	16,767,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	1	192,500,000	0	0	0	0	1	192,500,000
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	2	445,000,000	0	0	1	164,000,000	1	281,000,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	159,600,000	0	0	0	0	6	159,600,000
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	2	3,858,400	0	0	0	0	2	3,858,400
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	-	1	5,174,000	0	0	0	0	1	5,174,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	-	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	153	871,456,430	0	0	0	0	153	871,456,430
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	73	2,565,923,204	0	0	0	0	73	2,565,923,204
3050201	MEUBELAIR	-	572	1,693,596,550	0	0	0	0	572	1,693,596,550
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	2	31,150,000	0	0	0	0	2	31,150,000
3050204	ALAT PENDINGIN	-	74	712,599,326	0	0	0	0	74	712,599,326
3050205	ALAT DAPUR	-	10	26,947,000	0	0	0	0	10	26,947,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	136	643,971,076	0	0	0	0	136	643,971,076
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	38	493,746,176	0	0	0	0	38	493,746,176
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	29	456,082,600	0	0	0	0	29	456,082,600
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	64	171,465,000	0	0	0	0	64	171,465,000
3060310	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	2	48,136,000	0	0	0	0	2	48,136,000
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	539,149,000	0	0	0	0	1	539,149,000
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	2,920,000	0	0	0	0	1	2,920,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	38	507,209,560	0	0	0	0	38	507,209,560
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	181	2,832,376,250	0	0	0	0	181	2,832,376,250
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	326	1,491,465,450	0	0	0	0	326	1,491,465,450
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	3	75,003,500	0	0	0	0	3	75,003,500
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	109	524,738,500	0	0	0	0	109	524,738,500
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	56	6,380,967,270	0	0	0	0	56	6,380,967,270
3170119	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	1	99,688,820	0	0	0	0	1	99,688,820
3190102	PERALATAN PERMAINAN	-	1	12,144,000	0	0	0	0	1	12,144,000
135121	Aset Tetap Lainnya		349	140,926,055	0	0	0	0	349	140,926,055
6010101	BUKU	-	346	139,912,055	0	0	0	0	346	139,912,055
6010301	BAHAN KARTOGRAFI	-	3	1,014,000	0	0	0	0	3	1,014,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	1	164,000,000	0	0	1	164,000,000
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	0	0	1	164,000,000	0	0	1	164,000,000
TOTAL				21,150,061,167		164,000,000		164,000,000		21,150,061,167

Laporan Aset Tak Berwujud

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tanggal : 01/05/26 4:30 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		5	1,779,596,280	0	115,884,000	0	0	5	1,895,480,280
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	5	1,779,596,280	0	115,884,000	0	0	5	1,895,480,280
162161	Lisensi		0	0	0	0	0	0	0	0
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		0	0	0	0	0	0	0	0
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				1,779,596,280		115,884,000		0		1,895,480,280

Laporan Barang Rusak Berat

**DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

NAMA UAKPB : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KODE UAKPB : 664323

TANGGAL : 02-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
1	8.01.01.01.001	22	Software Komputer	RUSAK BERAT	17-11-	-	-	17-11-2017	70,730,000	-	RB-Henti Guna
JUMLAH									70,730,000	70,730,000	

Laporan Barang Hilang

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KODE UAKPB : 664323

TANGGAL : 01-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BYPDS)

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KODE UAKPB : 664323

TANGGAL : 01-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

Barang Hibah

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KODE UAKPB : 664323

TANGGAL : 01-05-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

Laporan Penyusutan Intrakomptabel

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 01/05/26 4:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		1,812	20,802,728,712	(19,156,923,896)	(572,440,972)	(19,729,364,868)	1,073,363,844
3010305	POMPA	-	1	16,767,000	(15,569,358)	(1,197,642)	(16,767,000)	0
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	1	192,500,000	(192,500,000)	0	(192,500,000)	0
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	1	281,000,000	(184,071,429)	123,857,142	(60,214,287)	220,785,713
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	6	159,600,000	(114,000,000)	(22,800,000)	(136,800,000)	22,800,000
3020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	2	3,858,400	(3,858,400)	0	(3,858,400)	0
3040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	-	1	5,174,000	(5,174,000)	0	(5,174,000)	0
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	-	1	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	141	864,256,430	(711,871,281)	(53,405,388)	(765,276,669)	98,979,761
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	73	2,565,923,204	(2,354,398,404)	(81,640,960)	(2,436,039,364)	129,883,840
3050201	MEUBELAIR	-	522	1,664,846,550	(1,561,227,015)	(39,754,470)	(1,600,981,485)	63,865,065
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	2	31,150,000	(31,150,000)	0	(31,150,000)	0
3050204	ALAT PENDINGIN	-	74	712,599,326	(596,451,216)	(46,819,756)	(643,270,972)	69,328,354
3050205	ALAT DAPUR	-	9	26,047,000	(26,047,000)	0	(26,047,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	129	638,744,676	(586,462,136)	(22,809,590)	(609,271,726)	29,472,950
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	37	493,416,176	(469,431,526)	(7,241,150)	(476,672,676)	16,743,500
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	29	456,082,600	(416,850,790)	(25,861,470)	(442,712,260)	13,370,340
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	64	171,465,000	(171,465,000)	0	(171,465,000)	0
3060310	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	2	48,136,000	(36,102,000)	(4,813,600)	(40,915,600)	7,220,400
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	539,149,000	(296,531,950)	(53,914,900)	(350,446,850)	188,702,150
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	2,920,000	(2,920,000)	0	(2,920,000)	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	38	507,209,560	(507,209,560)	0	(507,209,560)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	181	2,832,376,250	(2,457,770,653)	(245,035,810)	(2,702,806,463)	129,569,787
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	326	1,491,465,450	(1,397,675,814)	(40,613,677)	(1,438,289,491)	53,175,959
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	3	75,003,500	(75,003,500)	0	(75,003,500)	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	109	524,738,500	(461,311,450)	(37,360,400)	(498,671,850)	26,066,650
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	56	6,380,967,270	(6,370,769,145)	(6,798,750)	(6,377,567,895)	3,399,375
3170119	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	1	99,688,820	(93,458,269)	(6,230,551)	(99,688,820)	0
3190102	PERALATAN PERMAINAN	-	1	12,144,000	(12,144,000)	0	(12,144,000)	0
135121	Aset Tetap Lainnya		349	140,926,055	0	0	0	140,926,055
6010101	BUKU	-	346	139,912,055	0	0	0	139,912,055
6010301	BAHAN KARTOGRAFI	-	3	1,014,000	0	0	0	1,014,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1	164,000,000	0	(164,000,000)	(164,000,000)	0
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	1	164,000,000	0	(164,000,000)	(164,000,000)	0
JUMLAH			2,162	21,107,654,767	(19,156,923,896)	(736,440,972)	(19,893,364,868)	1,214,289,899

Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 01/05/26 4:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		71	42,406,400	(42,406,400)	0	(42,406,400)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	12	7,200,000	(7,200,000)	0	(7,200,000)	0
3050201	MEUBELAIR	-	50	28,750,000	(28,750,000)	0	(28,750,000)	0
3050205	ALAT DAPUR	-	1	900,000	(900,000)	0	(900,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	7	5,226,400	(5,226,400)	0	(5,226,400)	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	330,000	(330,000)	0	(330,000)	0
JUMLAH			71	42,406,400	(42,406,400)	0	(42,406,400)	0

CRBMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 1 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010305010	Pompa Air		1	16,767,000	1	16,767,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	16,767,000	1	16,767,000	0	0
3020101001	Sedan		1	192,500,000	1	192,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	192,500,000	1	192,500,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	281,000,000	1	281,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	445,000,000	2	445,000,000	0	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Unit	(1)	(164,000,000)	(1)	(164,000,000)	0	0
3020104002	Scooter		6	159,600,000	6	159,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	6	159,600,000	6	159,600,000	0	0
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji		2	3,858,400	2	3,858,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	3,858,400	2	3,858,400	0	0
3040104004	Lemari Penyimpan		1	5,174,000	1	5,174,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,174,000	1	5,174,000	0	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang		1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,500,000	1	5,500,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		8	31,869,500	8	31,869,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	31,869,500	8	31,869,500	0	0
3050104002	Lemari Kayu		13	157,853,900	13	157,853,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	157,853,900	13	157,853,900	0	0
3050104003	Rak Besi		62	291,532,390	50	284,332,390	12	7,200,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	62	291,532,390	50	284,332,390	12	7,200,000
3050104004	Rak Kayu		9	62,781,250	9	62,781,250	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 2 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	62,781,250	9	62,781,250	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		19	83,245,400	19	83,245,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	83,245,400	19	83,245,400	0	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu		37	176,204,150	37	176,204,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	37	176,204,150	37	176,204,150	0	0
3050104007	Brandkas		2	24,200,000	2	24,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	24,200,000	2	24,200,000	0	0
3050104015	Locker		2	27,714,840	2	27,714,840	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	27,714,840	2	27,714,840	0	0
3050104020	Lemari Display		1	16,055,000	1	16,055,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	16,055,000	1	16,055,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api		4	5,060,000	4	5,060,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	5,060,000	4	5,060,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		32	58,734,408	32	58,734,408	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	32	58,734,408	32	58,734,408	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		2	199,580,800	2	199,580,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	199,580,800	2	199,580,800	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		5	25,879,000	5	25,879,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	25,879,000	5	25,879,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi		4	27,150,000	4	27,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	27,150,000	4	27,150,000	0	0
3050105027	Alat Pencetak Label		1	4,000,000	1	4,000,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 3 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,000,000	1	4,000,000	0	0
3050105039	Display		15	2,163,356,596	15	2,163,356,596	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	2,163,356,596	15	2,163,356,596	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		2	58,900,000	2	58,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	58,900,000	2	58,900,000	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		5	6,113,300	5	6,113,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	6,113,300	5	6,113,300	0	0
3050105053	Acces Control System		2	13,649,100	2	13,649,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,649,100	2	13,649,100	0	0
3050105082	Mesin Fogging		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		86	375,198,100	86	375,198,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	86	375,198,100	86	375,198,100	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		388	689,906,600	338	661,156,600	50	28,750,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	388	689,906,600	338	661,156,600	50	28,750,000
3050201004	Kursi Kayu		1	33,550,000	1	33,550,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	33,550,000	1	33,550,000	0	0
3050201005	Sice		14	150,879,800	14	150,879,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	150,879,800	14	150,879,800	0	0
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal		2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
3050201008	Meja Rapat		29	105,334,450	29	105,334,450	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	29	105,334,450	29	105,334,450	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSPE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 105,334,450

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 4 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050201028	Workstation		52	327,727,600	52	327,727,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	52	327,727,600	52	327,727,600	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1	14,750,000	1	14,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	14,750,000	1	14,750,000	0	0
3050203002	Mesin Pel/Poles		1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
3050204001	Lemari Es		12	32,450,000	12	32,450,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	32,450,000	12	32,450,000	0	0
3050204004	A.C. Split		49	499,958,676	49	499,958,676	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	49	499,958,676	49	499,958,676	0	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		3	108,318,650	3	108,318,650	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	108,318,650	3	108,318,650	0	0
3050204006	Kipas Angin		1	7,850,000	1	7,850,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,850,000	1	7,850,000	0	0
3050204007	Exhause Fan		2	847,000	2	847,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	847,000	2	847,000	0	0
3050204999	Alat Pendingin Lainnya		7	63,175,000	7	63,175,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	7	63,175,000	7	63,175,000	0	0
3050205008	Kitchen Set		3	11,765,000	3	11,765,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	11,765,000	3	11,765,000	0	0
3050205011	Treng Air/Tandon Air		2	8,030,000	2	8,030,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,030,000	2	8,030,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 5 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050205025	Thermos Air		5	7,152,000	4	6,252,000	1	900,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	7,152,000	4	6,252,000	1	900,000
3050206002	Televisi		19	264,450,666	19	264,450,666	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	264,450,666	19	264,450,666	0	0
3050206005	Amplifier		1	4,638,810	1	4,638,810	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,638,810	1	4,638,810	0	0
3050206006	Equalizer		1	2,520,000	1	2,520,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,520,000	1	2,520,000	0	0
3050206007	Loudspeaker		10	111,429,500	10	111,429,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	111,429,500	10	111,429,500	0	0
3050206012	Wireless		4	10,351,000	4	10,351,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	10,351,000	4	10,351,000	0	0
3050206016	Mic Conference		12	20,514,000	12	20,514,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	20,514,000	12	20,514,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		1	1,512,500	1	1,512,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,512,500	1	1,512,500	0	0
3050206019	Stabilisator		41	26,609,000	41	26,609,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	41	26,609,000	41	26,609,000	0	0
3050206020	Camera Video		11	112,192,900	11	112,192,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	112,192,900	11	112,192,900	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila		2	28,854,000	2	28,854,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	28,854,000	2	28,854,000	0	0
3050206036	Dispenser		11	23,300,000	11	23,300,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 6 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	23,300,000	11	23,300,000	0	0
3050206037	Mimbar/Podium		1	9,000,000	1	9,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	9,000,000	1	9,000,000	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))		1	5,616,000	1	5,616,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,616,000	1	5,616,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind		11	10,826,700	4	5,600,300	7	5,226,400
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	10,826,700	4	5,600,300	7	5,226,400
3050206060	Asbak Tinggi		6	6,054,000	6	6,054,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	6,054,000	6	6,054,000	0	0
3050206061	Keset Kaki		1	4,182,000	1	4,182,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,182,000	1	4,182,000	0	0
3050206072	Lampu		3	1,920,000	3	1,920,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,920,000	3	1,920,000	0	0
3060101001	Audio Mixing Console		2	16,737,500	2	16,737,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	16,737,500	2	16,737,500	0	0
3060101005	Audio Amplifier		1	10,890,000	1	10,890,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,890,000	1	10,890,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		6	19,934,000	6	19,934,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	19,934,000	6	19,934,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		3	375,251,676	3	375,251,676	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	375,251,676	3	375,251,676	0	0
3060101068	Encoder/Decoder		20	18,700,000	20	18,700,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 7 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	18,700,000	20	18,700,000	0	0
3060101071	Receiver VHF/FM		1	23,500,000	1	23,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	23,500,000	1	23,500,000	0	0
3060101079	Microphone Cable		4	4,560,000	3	4,230,000	1	330,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	4,560,000	3	4,230,000	1	330,000
3060101098	Mixer Sound Sistem		1	24,173,000	1	24,173,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	24,173,000	1	24,173,000	0	0
3060102012	Video Monitor		1	8,942,000	1	8,942,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	8,942,000	1	8,942,000	0	0
3060102014	Video Tape Recorder Stationer		2	16,388,500	2	16,388,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	16,388,500	2	16,388,500	0	0
3060102016	Video Switcher		3	100,767,500	3	100,767,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	100,767,500	3	100,767,500	0	0
3060102061	Lensa Kamera		4	75,993,000	4	75,993,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	75,993,000	4	75,993,000	0	0
3060102120	Lighting Head Body		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3060102128	Camera Digital		6	197,024,000	6	197,024,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	197,024,000	6	197,024,000	0	0
3060102129	Tas Kamera		1	1,650,000	1	1,650,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,650,000	1	1,650,000	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera		6	49,632,600	6	49,632,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	49,632,600	6	49,632,600	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.29
Halaman : 8 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060102131	Lensa Filter		1	825,000	1	825,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	825,000	1	825,000	0	0
3060102151	Splitter		4	2,860,000	4	2,860,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	2,860,000	4	2,860,000	0	0
3060201003	Pesawat Telephone		52	118,690,000	52	118,690,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	52	118,690,000	52	118,690,000	0	0
3060201004	Telephone Mobile		1	10,800,000	1	10,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	10,800,000	1	10,800,000	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)		10	39,500,000	10	39,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	39,500,000	10	39,500,000	0	0
3060201010	Facsimile		1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,475,000	1	2,475,000	0	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya		2	48,136,000	2	48,136,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	48,136,000	2	48,136,000	0	0
3060347002	Genset		1	539,149,000	1	539,149,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	539,149,000	1	539,149,000	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)		1	2,920,000	1	2,920,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,920,000	1	2,920,000	0	0
3100101002	Mini Komputer		38	507,209,560	38	507,209,560	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	38	507,209,560	38	507,209,560	0	0
3100102001	P.C Unit		83	1,142,012,950	83	1,142,012,950	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	83	1,142,012,950	83	1,142,012,950	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 9 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100102002	Lap Top		15	312,100,000	15	312,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	312,100,000	15	312,100,000	0	0
3100102003	Note Book		65	1,144,104,500	65	1,144,104,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	65	1,144,104,500	65	1,144,104,500	0	0
3100102009	Tablet PC		18	234,158,800	18	234,158,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	234,158,800	18	234,158,800	0	0
3100201012	Hard Disk		325	1,236,965,450	325	1,236,965,450	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	325	1,236,965,450	325	1,236,965,450	0	0
3100201999	Peralatan Mainframe Lainnya		1	254,500,000	1	254,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	254,500,000	1	254,500,000	0	0
3100202015	Auto Switch/Data Switch		1	65,103,500	1	65,103,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	65,103,500	1	65,103,500	0	0
3100202017	Speaker Komputer		2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		82	199,614,900	82	199,614,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	82	199,614,900	82	199,614,900	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		27	325,123,600	27	325,123,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	27	325,123,600	27	325,123,600	0	0
3100204001	Server		18	5,607,711,340	18	5,607,711,340	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	5,607,711,340	18	5,607,711,340	0	0
3100204002	Router		4	21,370,800	4	21,370,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	21,370,800	4	21,370,800	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 10 dari 14
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100204013	Terminal		3	8,035,000	3	8,035,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	8,035,000	3	8,035,000	0	0
3100204014	Rak Server		9	69,510,000	9	69,510,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	9	69,510,000	9	69,510,000	0	0
3100204024	Switch		13	293,232,500	13	293,232,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	293,232,500	13	293,232,500	0	0
3100204026	Acces Point		3	24,420,000	3	24,420,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	24,420,000	3	24,420,000	0	0
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor		2	147,687,630	2	147,687,630	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	147,687,630	2	147,687,630	0	0
3100204035	Modul Untuk Penambahan di Core Switch		4	209,000,000	4	209,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	4	209,000,000	4	209,000,000	0	0
3170119004	Jet Pump		1	99,688,820	1	99,688,820	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	99,688,820	1	99,688,820	0	0
3190102001	Alat Tennis Meja		1	12,144,000	1	12,144,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,144,000	1	12,144,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 11 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				20,845,135,112		20,802,728,712		42,406,400

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 12 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		346	139,912,055	346	139,912,055	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	346	139,912,055	346	139,912,055	0	0
6010301002	Atlas		3	1,014,000	3	1,014,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,014,000	3	1,014,000	0	0
TOTAL				140,926,055		140,926,055		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
162151 Software

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 13 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101001	Software Komputer		5	1,895,480,280	5	1,895,480,280	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	5	1,779,596,280	5	1,779,596,280	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	dummy	0	115,884,000	0	115,884,000	0	0
TOTAL				1,895,480,280		1,895,480,280		0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 01/05/2026 16.41.30
Halaman : 14 dari 14
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	164,000,000	1	164,000,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	1	164,000,000	1	164,000,000	0	0
TOTAL				164,000,000		164,000,000		0

Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UAKPB : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Tgl Data : 01/05/26 12:39 PM
Tanggal : 01/05/26 4:42 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		5	1,895,480,280	(1,692,289,091)	(182,399,918)	(1,874,689,009)	20,791,271
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	5	1,895,480,280	(1,692,289,091)	(182,399,918)	(1,874,689,009)	20,791,271
JUMLAH			5	1,895,480,280	(1,692,289,091)	(182,399,918)	(1,874,689,009)	20,791,271

Catatan Atas Laporan BMN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025 *AUDITED*
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

I. GAMBARAN UMUM

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah didasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun lingkup penerapan atas pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan melalui pelaporan BMN. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang

II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

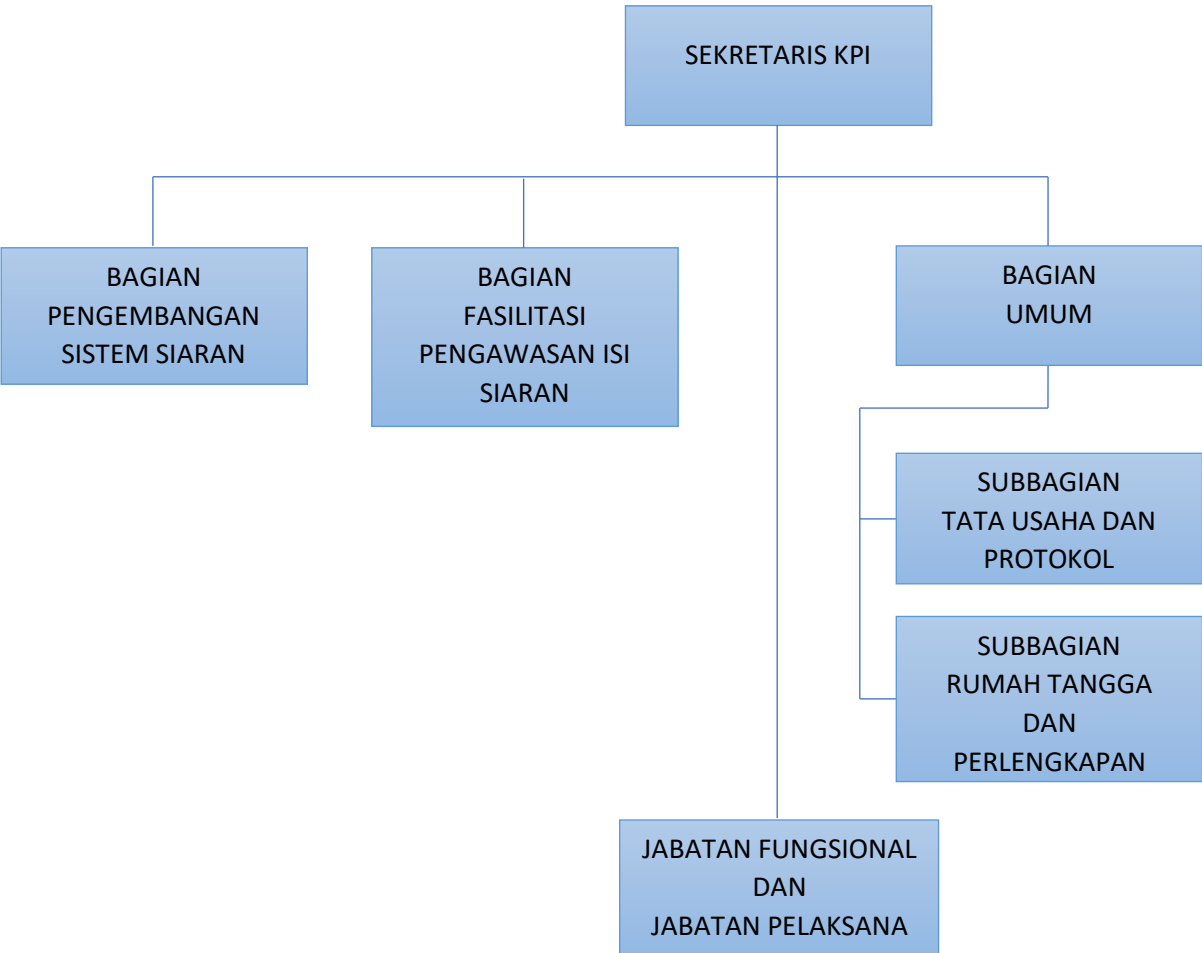
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2012 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pnggunaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 9 ayat 4 disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Sekretariat KPI Pusat adalah setingkat eselon 2a.

Saat ini, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Selain PNS dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretariat KPI juga didukung oleh pegawai non PNS yaitu PPPK dan PJLP, yang direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. Pegawai non PNS yang dimaksud antara lain tenaga ahli, asisten ahli, sekretaris komisioner, dan staf sekretariat.

Adapun struktur organisasi kesekretariatan pada KPI dapat ditinjau melalui Gambar di bawah ini



Adapun untuk visi dan misi KPI yakni, antara lain;

Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran;
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran;
3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.

IV. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Penggolongan dan kodifikasi BMN

Penggolongan dan kodifikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan dan kodifikasi BMN yang berlaku. Pada pembukuan BMN, barang dapat diklasifikasikan ke dalam; golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan/atau fungsinya. Tata cara penggolongan dan kodifikasi BMN diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan No. 120 tahun 2007.

b. Kapitalisasi

Penentuan nilai kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengacu pada Peraturan Teknis terkait Penatausahaan Barang Milik Negara. Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN, mengakibatkan Buku Barang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;

- 1) Buku Barang Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku

Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

- 2) Buku Barang Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

c. Rekonsiliasi

Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan serta melakukan rekonsiliasi internal antara data e-Rekon dan SAKTI.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No 7 tahun 2009.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga.

d. Penyusutan BMN

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap sesuai PMK No 65 tahun 2017 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.

V. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 Audited merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) beserta aset tak berwujud yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 Audited ini adalah sebesar **Rp21.150.061.167,-** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp21.150.061.167,-** dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025 Audited sebesar **Rp164.000.000,-** untuk mutasi masuk dan **Rp164.000.000,-** untuk mutasi keluar. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi

penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Adapun untuk penyusunan laporan BMN ini menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

VI. LAPORAN BARANG

a. Peralatan dan Mesin (132111)

Saldo Neraca BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp20,802,728,712,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp20,966,728,712,-** mutasi masuk dengan nilai **Rp0,-** dan mutasi keluar dengan nilai **Rp164,000,000,-** .

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

		INTRAKOMPTABEL
A.	Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2025	20,966,728,712
	Mutasi Masuk	
-	Penambahan Saldo Awal	0
-	Pembelian	0
-	Transfer Masuk	0
-	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
-	Pembatalan Penghapusan	0
-	Reklasifikasi Masuk	0
-	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
-	Pengembangan Nilai Aset	0
-	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
B.	Total Nilai Mutasi Masuk	0
	Mutasi Keluar	
-	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0
-	Penghapusan	164,000,000
-	Transfer Keluar	0
-	Reklasifikasi Keluar	0
-	Koreksi Pencatatan	0
-	Usulan Penghapusan ke Pengelola	0
-	Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0
C.	Total Nilai Mutasi Keluar	164,000,000
D.	Saldo Per 31 Desember 2025 (A+B-C)	20,802,728,712
E.	Akumulasi Penyusutan s/d Desember 2025	19,729,364,868
F.	Nilai Buku Per 31 Desember 2025 (D-E)	1,073,363,844

b. Aset Tetap Dalam Renovasi (135111)

Saldo Aset tetap dalam Renovasi pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp0,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp0,-** tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

c. Aset Tetap Lainnya (135121)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp140,926,055,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp140,926,055,-** tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

d. Persediaan

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah **Rp253,445,670,-** yang terdiri dari:

No.	Jenis Persediaan	Nilai
1	Barang Konsumsi	240,717,805
2	Bahan untuk Pemeliharaan	12,727,865
Total		253,445,670

e. Software (162151)

Saldo Software pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp1,895,480,280,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp1,779,596,280,-** mutasi masuk senilai **Rp115,884,000,-** berupa pengembangan aplikasi dan mutasi keluar senilai **Rp0,-**.

f. Aset Tak Berwujud Lainnya (153191)

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp. 0,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 0,-** mutasi masuk dengan nilai **Rp. 0,-** dan mutasi keluar senilai **Rp. 0,-**.

g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited senilai **Rp164,000,000,-** berupa usul penghapusan kendaraan roda 4.

h. Barang Milik Negara Pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2025 Audited

BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Neraca Laporan Barang Milik Negara pada Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2025 Audited adalah sebesar **Rp1,488,526,840,-**. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya beserta dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut (dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi):

NO.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	253,445,670	100,00%	0	0,00%	253,445,670	100,00%
	Sub Jumlah (I)	253,445,670	100,00%	0	0,00%	253,445,670	100,00%
II	Aset Tetap						
	Tanah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Peralatan dan Mesin	20,802,728,712	99,80%	42,406,400	0,20%	20,845,135,112	100,00%
	Gedung dan Bangunan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jalan dan Jembatan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Irigasi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jaringan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset tetap Lainnya	140,926,055	100,00%	0	0,00%	140,926,055	100,00%
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	164,000,000	100,00%	0	0,00%	164,000,000	100,00%
	Konstruksi dalam	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

	Pengerjaan						
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,729,364,868)	100,00%	(0)	0,00%	(19,729,364,868)	100,00%
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	(164,000,000)	100,00%	0	0,00%	(164,000,000)	100,00%
	Sub Jumlah (II)	1,214,289,899	96,63%	42.406.400	3,37%	1,256,696,299	100,00%
III	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Software	1,895,480,280	100,00%	0	0,00%	1,895,480,280	100,00%
	Aset tak Berwujud	0	0,00%	0	0,00%	0	0
	Amortisasi Software	(1,874,689,009)	100,00%	0	0,00%	(1,874,689,009)	100,00%
	Aset Lainnya yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah (III)	20,791,271	100,00%	0	0,00%	20,791,271	100,00%
	TOTAL	1,488,526,840	97,23%	42,406,400	2,77%	1,530,933,240	100,00%